

LAPORAN PENELITIAN

**AKTIVISME ISLAM DAN DEMOKRATISASI DI SULAWESI SELATAN:
STUDI ATAS PEMIKIRAN ISLAMISME PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) DAN
HIZBU TAHRIR INDONESIA (HTI)**



**OLEH
SYAHRIR KARIM**

**PUSAT PENELITIAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2013**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kepada penulis banyak nikmat. Semoga karunia-Nya selalu menyertai kita, Amin.

Penelitian ini merupakan hasil penyempurnaan dari penelitian yang telah dipresentasikan di lembaga penelitian UIN alauddin Makassar. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan tentang dinamika gerakan Islam politik khususnya di Sulawesi Selatan. Sebagai sebuah tulisan yang diharapkan ilmiah, penulis telah berusaha mencurahkan perhatian untuk menyusun sebaik mungkin. Penulis telah berusaha memnghimpun berbagai sumber kepustakaan yang ada untuk kemudian dicoba disajikan dengan cara penyajian yang segar agar lebih mudah dipahami.

Pemahaman tentang gerakan politik Islam ini khususnya kajian tentang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dianggap penting karena penelitian merepresentasikan dua gerakan Islam yang dominan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang bergerak di dalam parlemen (intra-parlemen) dan Hizbu Tahrir (HTI) di luar parlemen (Ekstra parlemen) menjadi representasi dari gerakan islam yang berstatus partai politik formal dan gerakan Islam yang berstatus non parpol / ormas. Penelitian ini terutama ditujukan untuk para mahasiswa khususnya para peminat ilmu social-dan politik khususnya yang fokus kepada kajian gerakan social. Tentu saja karya ini masih mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Dalam rangka memperbaikinya, tentu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran dari pembaca.

Proses penyelesaian buku ini tentu tidak akan pernah berjalan lancar tanpa bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, ucapan terima kasih disampaikan Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini baik materil maupun moril. Demikian pula kepada semua pihak yang telah menyumbangkan

pemikiran dan tenaga bagi kehadiran naskah akhir penelitian ini dihadapan pembaca, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam pula.

Samata-Gowa, 3 November
2013

Penulis

AKTIVISME ISLAM DAN DEMOKRATISASI DI SULAWESI SELATAN: STUDI ATAS PEMIKIRAN ISLAMISME PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN HIZBU TAHRIR INDONESIA

ABSTRAK

Penelitian ini fokus kepada aktivisme Islam dan demokratisasi, studi kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) di Sulawesi Selatan. Dalam menganalisis aktivisme kedua gerakan ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif. Data primer diambil melalui wawancara mendalam dengan para sumber otoritatif, selanjutnya data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, koran dan hasil kajian lepas. Untuk memandu penelitian ini, maka teori yang digunakan untuk membantu menjawab permasalahan kajian nantinya adalah teori Islamisme itu sendiri dan akan dibantu oleh teori gerakan Sosial serta beberapa konsep yang identik dengan aktivisme Islam seperti revivalisme, radikalisme dan fundamentalisme, modernis dan neo-modernisme Islam. Berdasarkan teori/konsep dan metode yang digunakan tersebut di atas, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka hasil kajian mendapati beberapa penemuan penting. **Pertama**, bahwa aktivisme Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) di Sulawesi Selatan adalah bagian dari pemikiran Islamisme yang ingin membangkitkan kembali ajaran Islam secara murni. Meskipun pendekatan mereka berbeda dalam mengaplikasikan visi politik masing-masing. PKS berjuang pada wilayah intra parlementer dan HTI di wilayah ekstra parlementer. Sedangkan HTI lebih cenderung anti demokrasi dengan lebih banyak beraktivitas di luar pemerintahan. **Kedua**, fenomena Islamisme dalam politik lokal di Sulawesi Selatan muncul bukan hanya reaksi dan fanatisme keagamaan semata, akan tetapi mereka ada karena respon atas kondisi yang ada, baik kondisi politik terutama kegagalan reformasi, ekonomi, pendidikan serta faktor lain seperti peran para tokoh Islam yang telah sejak lama yang memperjuangkan penegakan syariat Islam dalam institusi negara. Oleh karena itu, beberapa pergeseran gerakan/ide terjadi dikalangan kelompok Islamis, seperti dari formaistik ke substansialistik ide. Dengan penemuan tersebut, penelitian ini menyumbang dan memperkaya khazanah ilmu politik dalam dua aspek, dan kedua-duanya tidak dibahas oleh beberapa sarjana sebelum ini. **Pertama**, bahwa untuk membangun sintesis yang memungkinkan antara Islam (agama) dan negara agar tetap berjalan dengan baik maka pola hubungan yang sistematis antara sistem politik dan politik Islam harus sejalan. Proses diversifikasi makna politik (Islam) hanya boleh sukses ketika melibatkan berbagai lembaga swadaya Masyarakat (NGO) atau organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, bukan hanya pada partai politik saja. **Kedua**, penelitian ini menunjukkan bahwa Islamisme yang berpengaruh pada gerakan Islam-politik hanya berhasil apabila dimulai dengan melakukan kritik terhadap doktrin keberagamaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ABSTRAK

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	4

BAB II. AKTIVISME ISLAM: BEBERAPA PENDEKATAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

2.1 <i>Literature Riview</i>	5
2.2 Landasan Teori/Konsep	8
2.2.1 Islamisme	8
2.2.2 Islamisme dan Demokrasi	10
2.2.3 Islamisme dan Teori Gerakan Sosial	16

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Peneilitian	21
3.2 Teknik Pengumpulan Data	23

BAB IV. AKTIVISME PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) DAN HIZBU TAHRIR INDONESIA (HTI)

4.1 Islamisme di Sulawesi Selatan: perspektif teori gerakan social	25
4.2 Identifikasi gerakan dan Pola artikulasi kepentingan	41

BAB V. KESIMPULAN 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini dimulai dari isu bahwa *kenapa gerakan Islam (Aktivisme Islam/Islamisme) dalam memperjuangkan cita-cita ideologi-politik mereka, baik berupa perjuangan penegakan negara Islam, menjadikan Islam sebagai dasar negara, maupun penerapan syari'at Islam dalam kehidupan publik (formalisasi syari'ah) selalu muncul dan mengalami reproduksi dan apakah kemunculan mereka telah banyak berpengaruh terhadap demokratisasi di Indonesia.*

Era reformasi adalah sebuah era yang memasuki babakan baru dengan mendatangkan liberalisasi politik. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai-partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Islam juga mengambil bagian yang besar dalam era demokratisasi tersebut dengan munculnya partai-partai yang berasakan Islam. Selain itu, muncul juga gejala yang menonjol dan menimbulkan kontroversi yaitu bangkitnya kembali gerakan-gerakan Islam yang mengusung kembali piagam Jakarta dan penerapan syariat Islam yang sering disebut berhaluan radikal atau fundamentalis, seperti Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, Komite Penegakan Syari'at Islam (KPPSI), dan lain-lain di luar partai politik Islam yang mengusung isu yang sama.

Dalam konteks Islamisme, kehadiran partai-partai politik dan organisasi Islam bercorak Islamis atau ideologis di era reformasi tersebut telah secara terbuka menyuarakan dan mengusung kembali perjuangan menegakkan syari'at Islam. Setidaknya terdapat beberapa kelompok-kelompok Islamis yang semakin memperlihatkan aktivismenya, baik yang berada di dalam institusi formal maupun di luar institusi formal negara. Isu-isu tentang penegakan syariah dan penegakan syariah Islam yang di

perjuangkan oleh kelompok-kelompok Islamis tentu akan sangat berpengaruh terhadap politik lokal dan demokratisasi khususnya di Sulawesi Selatan.

Ada banyak alasan akademik yang menjelaskan pentingnya kajian tentang gerakan-gerakan Islamis (Islamisme). Diantaranya adalah ketika mempertautkan antara Islamisme dan demokrasi. Apakah Islamisme bisa menjadi potensi yang memperkuat reformasi sosial dan demokrasi di dunia Muslim atau sebaliknya justru menjadi ancaman bagi keberlangsungan gelombang demokrasi di dunia.

Diskursus “Islamisme sebagai ancaman” sebagian besar merupakan “produk intelektual” dari akademisi dari Barat. Namun ada juga kajian dari kalangan sarjana atau politisi dari negara-negara mayoritas muslim, terutamanya yang memiliki kerangka berfikir sekuler-liberal, yang menulis karya-karya akademik maupun non-akademik dengan cara pandang curiga terhadap Islamisme. Mereka biasanya lebih menonjolkan aspek-aspek Islamisme sebagai gerakan sektarian dan bersifat intoleran. Mereka juga menitikberatkan kecenderungan gerakan Islamis yang menggunakan kekerasan yang menurut mereka gerakan ini harus ditolak. Serangan teroris di Amerika Serikat, sejak tragedi World Trade Center (WTC) tahun 2001, makin menguatkan diskursus Islamisme sebagai ancaman.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam terkait aktivisme Islam politik dalam bingkai pemikiran Islamisme di Sulawesi Selatan yang telah mengilhami arah gerakan beberapa organisasi-organisasi Islam khususnya gerakan-gerakan ideologis khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI).

Setidaknya, bahwasan penelitian ini akan berusaha memberikan kajian mendalam terkait isu-isu Islamisme yang dibawa oleh dua organisasi besar yang sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) adalah dua organisasi Islamis yang sangat teguh memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam struktural kekuasaan.

Keduanya juga mewakili dua wilayah Islamisme, yakni PKS yang bergerak di dalam struktural kekuasaan kerajaan dan HTI yang bergerak di luar struktural kekuasaan negara.

Penulis memilih kasus Islamisme untuk studi ini karena selain merasa sangat akrab dengan komunitas dan pemikiran ini, penulis juga mempunyai beberapa pengalaman dalam menggali informasi yang relevan tentang masalah ini. Disamping itu, selama ini studi tentang gerakan-gerakan Islamisme khususnya di Sulawesi Selatan belum cukup dilakukan secara sistematis.

B. Rumusan Masalah

Secara umum bahwa pola dasar yang dihadapi politik Islam dalam hubungannya dengan negara adalah adanya kasusulitan untuk membangun sintesis yang memungkinkan di antara keduanya. Faktor utama yang menyebabkan kemandegan politik ini adalah keinginan para pemikir dan aktivis politik Islam untuk membangun hubungan Islam dan Negara secara legalistik dan formalistik.

Oleh karena itu, dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka akan dirumuskan permasalahan penelitian utama sebagai berikut:

Apakah Islamisme bisa menjadi potensi yang memperkuat reformasi sosial-politik dan demokratisasi atau justru menjadi ancaman terhadap tatanan sosial politik. Dalam kasus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI), bagaimana keduanya sebagai partai dan atau gerakan Islamis telah menyesuaikan diri dengan keikutsertaan dalam system demokrasi serta bagaimana pengaruhnya terhadap demokratisasi di dunia muslim khususnya di Sulawesi Selatan?

1. Dalam dinamika politik lokal, bagaimana kelompok Islamis ini mengartikulasikan kepentingan mereka?

2. Sejuahmana kelompok-kelompok Islamisme ini masuk dalam arena politik dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana aktivisme Islam (Islamisme) ini menjadi potensi yang memperkuat reformasi sosial-politik dan demokratisasi atau justru menjadi ancaman terhadap tatanan sosial politik.
- b. Untuk mengetahui bagaimana perubahan dalam konteks politik membentuk ide-ide dan aktivisme Islamis PKS dan HTI dengan menyesuaikan diri dengan sistem yang ada.
- c. Memperjelas sejauhmana kelompok-kelompok Islamisme ini masuk dalam arena politik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya di Sulawesi Selatan.
- d. Menganalisis bagaimana kelompok Islamis ini mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan mereka.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini akan berusaha untuk menemukan pola hubungan yang sistematis antara sistem politik dan politik Islam di Sulawesi Selatan, baik dari segi sejarah dan gerakan. Sehingga Penelitian ini minimal dapat memberikan jalan keluar atas kasusulitan selama ini untuk membangun sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara agar tetap berjalan dengan baik.
- b. Studi ini berupaya memberikan sumbangan akademik dalam bidang ini, melalui evaluasi analitis kritis atas proporsi-proporsi yang menunjukkan adanya klaim bahwa umat Islam Indonesia

khususnya di Sulawesi Selatan sudah mengalami pergeseran perilaku politik karena disebabkan beberapa faktor, tingkat keterlibatan dan pelibatan politik yang tidak rasional lagi atau bahkan sudah emosional-tradisional. Hal tersebut akan terlihat dan dijelaskan lewat data dan fakta yang ada nantinya.

- c. Penelitian diharap akan membantu memperkaya studi-studi empirik tentang fenomena politik Islam di Indonesia juga untuk menyuguhkan kajian sistematis dan empiris mengenai Muslim Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan berdasarkan kajian akademik.

BAB II

AKTIVISME ISLAM: BEBERAPA PENDEKATAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL

A.Literature Review

Dari hasil penelusuran perpustakaan, kajian terhadap Islamisme di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan dengan menggunakan perspektif gerakan sosial dan politik masih langka. Meskipun terdapat beberapa hasil Penelitian yang mengkaji tentang Islamisme di Indonesia dan Asia Tenggara, akan tetapi masih bersifat secara umum. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian selanjutnya adalah Bernhard Platzdasch (2009) yang berjudul *Islamism in Indonesia; Politics in the Emerging Democracy*. dalam studi ini penulisnya mempermasalahkan hubungan antara cara pandang dan orientasi politik yang berbeda antara komunitas Islamism dan komunitas Nasionalis-sekuler. Perbedaan ini menurutnya dapat dijelaskan dengan melihat pada proses sosialisasi politik di kalangan Islamis yang lebih cenderung menggunakan cara dakwah dan Jihad seperti penegakan syariah dan negara Islam. Namun studi tersebut tidak memberikan gambaran secara lengkap mengenai akar gerakan Islam khususnya PKS dan HTI sehingga tidak memberikan secara dalam pengaruh gerakan Islamis keatas reformasi sosial politik dan demokratisasi. Dalam kajian tersebut juga tidak memberikan gambaran secara konprehensif sinergitas antara partai Islamis dan kelompok-kelompok Islamisme non-partai politik dalam mengawal cita-cita ideologi-politik mereka serta bagaimana sistem politik demokratis membentuk ide-ide dan aktivisme Islam. Selanjutnya yang membedakan dengan penelitian ini adalah, bahwa PKS dan HTI dalam konteks Sulawesi Selatan menjadi ciri khas tersendiri karena secara tidak langsung keduanya akan dipengaruhi oleh konstalasi dan sosio-historis politik lokal. Selanjutnya, penelitian ini tidak

terfokus pada gerakan Islamisme di Sulawesi Selatan yang tentu akan berbeda karakter gerakannya dengan daerah lainnya. Penelitian ini juga lebih mengarah kepada pandangan umum tentang Islamisme yang selalu memperhadapkan secara negatif Islam dan negara. Padahal eksistensi gerakan-gerakan kaum Islamis juga akan sangat tergantung dengan situasi atau sistem politik sehingga posisi Islamis boleh saja beradaptasi dengan sistem yang ada. Hal inilah yang akan membezakan dengan penelitian ini kelak.

Selanjutnya kajian yang ditulis oleh Laura Guazzone, *The Islamist Dilemma; The Political Role of Islamist Movement in The Arab World*, Ithaca Press, UK. 1995. Dalam buku ini dibagi dua penjelasan, pertama; Islamisme dalam proses politik domestik, dan Kedua; Efek Islamisme dalam negeri maupun dalam hubungan internasional. Semua tulisan dalam buku ini adalah hasil penelitian beberapa ahli di bawah proyek penelitian Instituto Affari Internazionali (IAI), di Italian Institute of International Affairs. Hasil penelitian di beberapa negara arab, seperti Sudan Algeria, Tunisia, Jordania dan Mesir.

Beberapa literatur yang terkait dengan perjuangan negara Islam dan formalisasi syariah di Indonesia antara lain dapat dilihat dari tulisan Haedar Nashir. Haedar Nashir (2007) misalnya menulis tentang *Gerakan Islam Syariat; Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Kajian ini menggunakan perspektif gerakan sosial (*social movement*) khususnya gerakan keagamaan. Haedar dalam tulisannya berusaha mencari tahu aspek penting dari beberapa gerakan yang tampil dengan militan seperti HTI, MMI, Jemaat al-Islamiyah, dan beberapa kelompok-kelompok yang lain. Beberapa aspek yang dianalisis adalah gerakan Islam syariat dengan pendekatan sosiologis. Hasil dari Penelitian memnemukan bahwa perjuangan negara Islam dan formalisasi syariah di Indonesia akan mendapat banyak tantangan baik internal maupun eksternal. Kajian ini berusaha memahami seperti apa wajah Islam di masa depan jika kelompo-kelompok “salafiyah Ideologis” ini

mendominasi kehidupan keagamaan di Indonesia. Maka salah satu tawaran yang dilakukan untuk mengurangi gerakan-gerakan salafiyah dan Islam militan adalah memberikan alternatif gerakan dengan menghidupkan kembali gagasan demokrasi dan *civil society*.

Studi tentang gerakan politik Islam oleh beberapa sarjana pernah menulisnya. Di antaranya oleh Syarif, *Radikalisme Islam: Studi tentang gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Menegakkan Syariat Islam periode 2000-2003*. Dalam penelitian ini terkhusus mengkaji bagaimana MMI melakukan gerakan penegakan syariat Islam di Indonesia. Meskipun hanya mengkaji khusus pada MMI, setidaknya kajian ini memberikan gambaran umum studi gerakan yang mempresentasikan gerakan-gerakan oleh kelompok Islamis lainnya. Dalam studi ini, penulis mengkategorikan MMI sebagai gerakan radikalisme Islam dengan memakai perspektif dari teori radikalisme Islam. Penulisnya juga berusaha menjelaskan awal munculnya gerakan radikalisme Islam di Indonesia. Secara umum kajian ini belum memberikan perspektif baru terkait gerakan Islam secara umum khususnya bangunan teori baru dan klasifikasi atau kategorisasi gerakan Islam yang ada di Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Agus Salim, *The Rise of Hizb ut-Tahrir (1982-2004): Its Political Opportunity Structure, resource, Mobilisation, and Collective Action Frames*. Kajian ini adalah merupakan tesis Master di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2004. Perbincangan khusus kepada Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) terhadap aksi politiknya. Dalam kajian ini didapatkan temuan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh HTI di Indonesia dalam memperjuangkan cita-cita ideologi mereka sangat sistematis. Karena orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang punya kapasitas keilmuan yang cukup. Sehingga gerakan-gerakan yang mereka lakukan sangat memberikan simpatik oleh kerajaan. Adapapun aksi-aksi kolektifnya juga menjadi perhatian utama pemerintah. Akan tetapi dalam

hal peran politik mereka dinilai kurang berpengaruh dan masih sebatas perjuangan wacana. Secara umum kajian ini lebih fokus kepada aksi kolektif HTI dalam memperjuangkan cita-cita ideologis mereka, belum pada tahap bagaimana HTI ini membangun komunikasi dengan organisasi Islamis lainnya dengan melihat isu-isu Islamis yang sama seperti halnya di Sulawesi Selatan

Muhammad Rahmat Imdadun, *Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980-2002: Studi Atas Gerakan Tarbiyah dan Hizbu tahrir Indonesia*. Kajian ini merupakan tesis Master di Universitas Indonesia Jakarta, 2003. Kajian ini tefokus pada sebuah proses bagaimana pengaruh gerakan Islam Timur Tengah terhadap gerakan-gerakan Islam di Indonesia khususnya HTI dan Gerakan Tarbiyah yang menginspirasi terbentuknya PKS. Kajian ini mendapatkan kasusimpulan bahwa sejak tahun 1980-2002, gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah turut memberikan pengaruh besar terhadap gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Terbukti bahwa banyak gerakan-gerakan Islam di Indonesia muncul dan terinspirasi dari gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya orang Indonesia menjadi pelajar di Timur Tengah, dan sebagai buktinya rata-rata tokoh dari gerakan-gerakan Islam di Indonesia adalah alumni pelajar Timur Tengah. Secara umum kajian ini lebih fokus kepada pengaruh gerakan Islam Timur Tengah ke atas gerakan Islam yang ada di Indonesia. Kajian ini belum dan tidak memberikan kajian lebih mendalam tentang bagaimana Islamisme berpengaruh dalam politik secara umum.

Selanjutnya dari beberapa karya-karya mengenai Islamisme atau gerakan Islam ideologis di Indonesia belum sampai pada hasil yang konklusif. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi kekosongan itu, dengan mendefinisikan Islam secara empiris menurut dimensi-dimensi Islam dan komponen-komponen demokrasi, seperti demokrasi dengan pendekatan

kultural, pelibatan politik dan beberapa institusi politik yang ada baik formal maupun non-formal.

B. Landasan Teori/Konsep

1. Konsep Islamime

Kehadiran gerakan Islam yang mengusung ideologi, yang mempertautkan Islam secara langsung atau integral dengan institusi negara atau politik, dalam wacana kontemporer dikenal dengan Islamisme (*Islamiyah*). Gerakan ini (*Islamisme*) memandang bahwa Islam tidak dapat dipisahkan dari dan memiliki hubungan integral dengan politik negara, karena Islam mencakup seluruh aspek kehidupan.¹ Kelompok Islamis inilah yang memiliki kecenderungan sebagai muslim yang termotivasi secara ideologis dan representasi dari “gerakan Islam” (*al-harakah al-Islamiyyah*).²

Dalam konsep lain, Islamisme juga dapat diartikan sebagai sebuah gerakan atau organisasi yang berusaha mengubah masyarakat Muslim dengan program dan ideologi yang di ambilkan dari teks suci Islam.³ istilah “Islamis” (*Islamiyyun*) adalah istilah yang dipilih sendiri oleh mereka yang menjadi bagian dari gerakan Islamis. Istilah “Islamis” berbeda dari istilah “Muslim” dalam pengertian bahwa yang pertama merujuk pada orang-orang dengan agenda sadar aktivis, sementara yang kedua adalah sebuah identitas nominal bagi individu atau sekelompok orang dari serangkaian pandangan ideologis. Islamisme merujuk pada politik Islamis mahpun proses re-Islamisasi.⁴

Islamis politik merujuk pada aktivitas organisasi dan gerakan yang menyeruak ke ruang publik dengan menggunakan tanda dan simbol dari

¹ Roy Olivier, *The failure of Political Islam*, dalam Haedar Nashir, *Gerakan Islam Syariah*,...h. 275

²Dale F. Eickelman dan James Piscatori (1998), *Ekspresi Politik Muslim*, Mizan, Bandung. h. 58

³Najib Ghabbian, *Democratization and the Islamist Challenge*, h. 6.

⁴Masdar Hilmy, *Teologi Perlawanan; Islamisme dan Diskursus di Indonesia Pasca Orde Baru*. Kanisisus, Yogyakarta:2009. h.24

tradisi Islam. Ia termasuk ideologi politik yang mengartikulasikan gagasan perlunya mendirikan sebuah pemerintahan Islam, yang dipahami sebagai suatu pemerintahan yang menerapkan syariat (hukum Islam). Islamisasi atau re-Islamisasi menunjukkan dorongan untuk mengislamkan ruang sosial.⁵

Tentang Islamisme, Ayubi menyebutkan bahwa istilah ini biasanya digunakan untuk menunjuk tiga kategori gerakan Islam: salafi, fundamentalis dan neo-fundamentalis. Islamisme tidak sekedar menekankan identitas sebagai muslim, tetapi lebih kepada pilihan sadar terhadap Islam sebagai doktrin dan ideologi. Islam politik (*political Islam*) sering digunakan untuk merujuk kepada kategori fundamentalis dan neo-fundamentalis yang cenderung menekankan watak politik dari Islam dan terlibat dalam kegiatan anti-negara secara langsung.⁶

Dengan beberapa definisi konsep di atas, maka sangat jelas bahwa baik aksi dan pemikiran PKS dan HTI jelas masuk dari kategori gerakan Islamis. Gerakan ini telah banyak memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan sosial politik khususnya di Sulawesi Selatan.

2. Teori Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Konsep tentang gerakan Islam bermanfaat untuk menjelaskan mengapa gerakan dakwah tarbiyah pada akhirnya berubah menjadi gerakan politik islam yang memilih bentuk partai politik. Dari perspektif gerakan politik Islam maka dapat dipahami mengapa pada akhirnya Gerakan dakwah tarbiyah yang secara umum memandang tidak ada pemisahan antara Islam dan Politik ketika ada kesempatan gerakan ini akan memanfaatkan struktur politik yang tersedia untuk memperkuat pertumbuhan gerakan, serta pada ujungnya untuk mewujudkan cita-cita gerakan. Dari perspektif teori gerakan Islam kiranya dapat dijelaskan dengan memadai pertanyaan mendasar

⁵Salwa Ismail, "Being Muslim: Islam, Islamism and Identity Politics," *Government and opposition* 39, No. 4 (2004), h.66

⁶Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, 67-68.

mengapa Gerakan Dakwah tarbiyah yang sudah mulai masuk Indonesia 1980-an, akhirnya ketika muncul peluang politik mengalami metamorfosis menjadi sebuah partai politik yang bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sama halnya dengan Hizbu (partai) Tahrir Indonesia HTI), bahwa dengan aksi-aksi kolektifnya telah berubah menjadi sebuah gerakan Islam dengan mengusung sistem Khilafah. Dalam teori gerakan sosial, setidaknya ada tiga unsur analisis yang mesti diperhatikan, yakni *pertama*, Peluang politik (konsep “struktur peluang politik”); *kedua*, *Framing* (pembingkaihan)-yakni suatu proses di mana aktor gerakan sosial menciptakan dan melindungi wacana yang dapat bergema di antara mereka yang menjadi target mobilisasi.⁷ *Ketiga*, Struktur mobilisasi- yakni bahwa teori gerakan sosial mengikuti pentingnya perubahan struktural dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya aksi-aksi kelompok.⁸

Analisis teori dan solusi yang ditawarkan kaum cendekiawan selama ini terkait aksi-aksi kolektif PKS dan HTI, selanjutnya diikuti dengan berbagai pemaknaan gerakan. Inilah yang dikenal sebagai gerakan kebangkitan Islam. Gerakan Kebangkitan Islam pada dasarnya adalah suatu gerakan yang dilandasi oleh suatu pandangan kaum muslim bahwa Islam akan menjadi penting kembali.⁹ Masa lalu Islam yang gemilang dianggap mempengaruhi pemikiran kaum muslim masa kini sehingga pada masa mendatang Islam akan menjadi alternatif. Gerakan Kebangkitan Islam ini terus berlangsung dan bergema hingga abad ke-21 ini. Gerakan kebangkitan islam inilah dalam berbagai variannya yang melahirkan gerakan Islamis (Islamisme).

⁷David A. Snow, E. Burke Rochford, Steven K. Worden, dan Robert D. Benford, 1986, “ Frame Alignment Process, Micromobilization, and Movement Participantion”, *American Sociological review*, 51 :461-81.

⁸Noorhaidi Hasan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer; konsep Genealogi, dan Teori*, SUKA Press, Yogyakarta, 2012. Hlm. 137.

⁹Chandra Muzaffar, 1993. *Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global Dengan Ilustrasi Dari Asia Tenggara*, dalam Saiful Mujani (ed.), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES. Hlm. 58-103.

Akhirnya, terkait dengan teori gerakan sosial, posisi Islamisme telah diperkuat dengan dua argumen akademis dan teoritis yang dominan menjelaskan masalah ini adalah argumen mengenai konsep Islamisme yang akan memperdebatkan lahirnya beberapa gerakan Islam seperti revivalisme Islam, fundamentalisme Islam, radikalisme Islam dan Modernisme dan neo-modernisme Islam serta argumen mengenai gerakan sosial (*social movement*) dalam hal ini gerakan agama (*religious movement*).

d. Islamisme dan demokrasi

Islam adalah agama monoteistik yang disebarkan oleh nabi Muhammad SAW, Alquran dan Sunah merupakan sumber atau pedoman bagi umat untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dan politik. Sehingga, umat Islam (juga non Islam) pada umumnya mempercayai watak holistik Islam sebagai instrument ilahiah untuk memahami dunia. Islam seringkali dipandang lebih dari sekedar agama, untuk itu pandangan tersebut menyatakan bahwa Islam tidak mengakui tembok pemisah antara yang spiritual dan yang temporal, melainkan mengatur semua aspek kehidupan. Bagi Hassan Hanafi, bahwa term “Islam” yang umum harus dimaknai sebagai “sebuah agama tertentu’. Menurutnya, term ini sebaiknya diganti dengan term ‘pembebasan” (*taharrur*) sebagaimana disimbolkan dalam syahadat. Menurutnya lagi, ‘Islam’ berarti pembebasan kesadaran manusia dari kekuatan-kekuatan tiran. ‘Islam’ memang juga bermakna “penyerahan”, tetapi makna tersebut telah dimanipulasi oleh kaum elit menjadi “penyerahan” kepada penguasa sebagai implementasi dari penyerahan kepada Tuhan. Karena itu, Hanafi lebih menekankan pada makna lain dari kata “Islam”, yakni “protes, oposisi, dan revolusi”.¹⁰

Sedangkan negara memiliki kekuatan untuk memaksa dan negara merupakan entitas yang otonom seperti lembaga-lembaga dan institusi. Bagi

¹⁰ Nanang Tahqiq (ed.), *Politik Islam*, Kencana, Jakarta, 2004. h. 226.

Thomas Hobbes, negara berhak melakukan kekuasaan secara absolut kepada rakyat karena negara pada dasarnya sudah ada kontrak dengan masyarakatnya ketika diberikan kewenangan untuk berkuasa oleh rakyat. Kekuasaan itu harus mutlak bagi penguasa.¹¹ Bisa dikatakan bahwa negara adalah sesuatu yang jauh, bahkan asing, kumpulan manusia paling jauh yang dapat dengan mudah berubah menjadi hubungan permusuhan. Maksudnya negara dapat menggunakan kekuatan memaksa untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu, dan tidak tertutup kemungkinan Negara dimanfaatkan oleh elit politik untuk kepentingan pribadi.

Sebagai sebuah alat untuk memahami kehidupan, Islam sering dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari pada sekedar sebuah agama. Ada yang melihatnya sebagai suatu “masyarakat sipil”. Ada juga yang menilainya sebagai suatu sistem “peradaban yang menyeluruh”. Bahkan ada pula yang mempercayainya sebagai suatu “agama dan Negara”. Apa yang ada dibalik rumusan-rumusan itu, pada dasarnya adalah pandangan umum bahwa Islam itu lebih dari sekedar sistem ritus dan atau ideologi. Lebih khusus lagi, Islam tidak mengenal dinding pemisah antara yang bersifat spiritual dan temporal. Sebaliknya, Islam memberikan panduan (etis) bagi setiap aspek kehidupan.¹²

Agama, seperti dinyatakan banyak orang dapat dilihat sebagai instrumen Ilahiah untuk memahami dunia¹³. Islam dibandingkan dengan agama-agama lain, sebenarnya merupakan agama yang paling mudah untuk menerima premis semacam ini. Alasan utamanya terletak pada ciri Islam yang paling menonjol yaitu sifatnya yang hadir dimana-mana (*omnipresence*).

¹¹Fidaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi dan pengaruhnya terhadap Dunia ke-3*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.h. 123-124.

¹²Bahtiar Effendy, *Re-Politisasi Islam; Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik*, Mizan, Bandung, 2000. h. 8.

¹³Argumen ini pernah dikemukakan secara cukup kuat oleh Robert N Bellah. Lihat tulisannya “Islamic Tradition and The Problem of Modernization”, “Robert N Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion In a Post Traditionalist World*, Berkeley and Los Angeles; University of California Press, 1991; h. 146

Ini sebuah pandangan yang mengakui bahwa “dimana-mana”, kehadiran Islam selalu memberikan panduan moral yang benar bagi tindakan manusia¹⁴.

Pandangan ini telah mendorong sejumlah pemeluknya untuk percaya bahwa Islam mencakup cara hidup yang total penumbuhannya dinyatakan dalam syari’ah (Hukum Islam). Bahkan sebagian kalangan Islam melangkah lebih jauh dari itu, mereka menekankan bahwa Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Tak diragukan lagi, mereka percaya akan sifat Islam yang sempurna dan menyeluruh sehingga menurut mereka, Islam meliputi tiga “D” yang terkenal itu (Din, Agama, Dunya: Dunia, Dawlah, Negara).

Mengakui syari’ah sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh merupakan suatu hal, sementara memahaminya secara benar adalah hal lain lagi. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman umat Islam terhadap syari’ah. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual, atau apa yang disebut Arkoun sebagai “estetika penerimaan” (*aesthetics of reception*), sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman¹⁵.

Munculnya berbagai mazhab fikih, teologi, dan filsafat Islam, misalnya menunjukkan bahwa ajaran Islam itu multi interpretatif. Watak multi interpretatif ini telah berperan sebagai dasar dari kelenturan Islam dalam sejarah. Selebihnya, hal yang demikian itu juga mengisyaratkan kehausan pluralisme yang demikian itu juga mengisyaratkan keharusan pluralisme

¹⁴ Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*, Chicago and London: University Of Chicago Press, 1988, h. 4

¹⁵ Arkoun, *The Concept Of Authority In Islamic Thought*, Jurnal Ulumul Qur’an, Nomor 5 & 6, volume 5, 1994.

dalam tradisi Islam. Karena itu, sebagaimana telah dikatakan oleh banyak pihak, Islam tidak bisa dan tidak seharusnya dilihat secara monolitik¹⁶.

Namun demikian harus dipahami bahwa kekuasaan tertinggi dalam hukum adalah milik Allah SWT, yang perwujudannya di alam nyata adalah Al-Qur'an. Karena itu pemutus tertinggi dalam lingkungan masyarakat muslim adalah Al-Qur'an. Kekuasaan tertinggi dalam demokrasi adalah milik rakyat. Karena itu eksistensi pemerintahan dalam masyarakat Islam memerlukan pengakuan rakyat.

Selanjutnya secara substansial politik Islam¹⁷ merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Negara ataupun masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang berdasarkan kepada keyakinan bersama mengenai ke-Tuhanan. Bahwa dalam Islam juga tidak ada pemisahan antara spiritual dengan yang duniawi, keduanya menyatu dalam bingkai doktrinal Islam, ia menyatu karena pemahaman atas doktrin yang integratif.¹⁸ Dalam konteks seperti itu, wacana menjadi sesuatu yang sangat penting dan menentukan. Diskursuslah yang menjadi dasarnya mempengaruhi dan membentuk pandangan orang tentang politik dan atau ideology Islam.

Secara global, Ilmu Politik Islam dapat dipahami sebagaimana Ilmu Politik pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah landasan ide yang mendasari definisi tersebut. Politik Islam tentu saja mendasarkan

¹⁶ Mohammad Ayoob, *Might of the Monolith*, Mohammad Ayoob (ed), *The Politic of Islamic Reassertion*, London: Croom Helm, 1981.

¹⁷Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Orang yang terlibat dalam aktivitas politik ini belum tentu umat Islam secara keseluruhan. Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah kelslaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik.

¹⁸Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. h. 23.

penggalan ide-ide politiknya bersumber pada Alquran dan As-sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wahyu Tuhan dalam Politik Islam mendapatkan posisi urgen.

Beberapa hal yang perlu dipahami bersama bahwa sampai saat ini ada tiga pendapat yang berkembang dalam lingkungan kaum muslim tentang politik. *Pertama*, aliran yang berpendapat bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk bernegara. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa Alquran tidak mengatur masalah politik atau ketatanegaraan. *Ketiga*, pendapat yang mengambil jalan tengah bahwa dalam Alquran tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Mengamati berbagai persoalan yang berkembang akhir-akhir ini, khususnya dalam bidang politik Islam, dan jika mau merenung lebih mendalam, jelas tergambar bahwa sebuah pemahaman yang benar, evaluatif, kritis, dan rasional akan menunjukkan Islam bukanlah agama politik semata. Bahkan, porsi politik dalam ajaran Islam meskipun sangat kecil tapi pemaknaan dalam tataran praktis sangat besar. Seperti berkaitan langsung dengan kepentingan banyak orang, nilai-nilai kemanusiaan dan lain-lain.

Sejauh ini ada tiga pandangan yang mencoba memecahkan masalah dikotomi antara agama (Islam) dan Negara.¹⁹ *Pertama*, Islam dan Negara adalah *integrated* (bersatu), tak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga politik dan agama sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi. *Kedua*, Islam dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu berhubungan timbal-balik dan saling memerlukan.²⁰ Dalam

¹⁹Ibid. Bandingkan dengan Munawir Sadzali yang mengidentifikasi adanya tiga pandangan tentang hubungan Islam dan Negara di Indonesia. Lihat Munawir Sadzali, 1993. *Islam dan tata Negara; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press. Hl. 1-3.

²⁰Pemahaman Kuntowijoyo nampaknya juga dapat dilihat dalam kerangka ini. Menurutnya, Agama dan Negara adalah dua antitas yang terpisah, namun dapat bertemu

hal ini, Islam memerlukan negara karena dengan negara, Islam dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama (Islam) agar dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Ketiga, hubungan Islam dan negara bersifat sekularistik. Pandangan ini menolak sama sekali pendasaran negara kepada Islam, atau setidaknya menolak determinasi Islam atas bentuk negara. Di kalangan muslim, pemrakarsa pandangan ini antara lain adalah Ali Abd Al-Raziq. Ketiga pandangan tentang hubungan Islam dan negara ini dapat dipakai untuk melihat perkembangan persepsi umat Islam terhadap negara dan sebaliknya.

Dalam Alquran juga tidak mengatur secara khusus terkait urusan politik, tetapi lebih kearah yang sifatnya substansi yakni isu-isu penegakan keadilan, kebajikan, kemiskinan, pendidikan, dan lain-lain. Alquran hanya meletakkan garis besar pada kaum muslimin, kemudian memberikan kebebasan untuk memikirkan hal-hal yang diinginkan dengan ketentuan tidak sampai melanggar batas-batas yang telah ditetapkan.

Rasulullah sendiri belum pernah menentukan sistem politik dan kekuasaan tertentu melalui sunah dan kebijaksanaannya. Tetapi beliau hanya memberikan contoh yang baik sebagai pemimpin disaat pemerintahan madinah.²¹ Hal ini yang semestinya harus kita sadari bersama agar politik tidak menjadi “panglima” gerakan Islam yang mempunyai keterkaitan dengan sebuah institusi yang bernama kekuasaan. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya menjadi tekanan bagi gerakan-gerakan Islam dalam membangun sebuah bangsa, bukan mementingkan formalisasi ajaran-ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, persoalan formalisasi ideologi Islam dalam kehidupan bernegara tidak menjadi kebutuhan utama dalam bernegara. Bagi Nurcholish Madjid, yang terpenting bagi umat Islam adalah

karena saling memerlukan. Pertemuan ini dalam bentuk kelembagaan, misalnya partai politik. Lihat Kuntowijoyo, 1997. *Identitas Politik Ummat Islam*, Bandung: Mizan. Hlm. 191-193.

²¹Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan & Al-Qur'an*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004. h. 131

bahwa keharusan untuk lebih terbuka (*open minded*), yakni kesediaan untuk menerima pikiran-pikiran, tanpa mempedulikan dari mana sumbernya, asal hal tersebut berbicara tentang kebenaran.²²

Justru penampilan nonformal agama dalam kehidupan bernegara harus terwujud tanpa formalisasi dirinya. Dengan demikian, agama Islam menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam dalam kehidupan bernegara. Inti pandangan seperti itu terletak pada kesadaran bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan daripada membuat dirinya menjadi wahana bagi formalisasi agama yang bersangkutan dalam kehidupan bernegara.

C. Islamisme dan Teori Gerakan Sosial (*Social Movement*)

Untuk memahami fenomena Islam era moden ini tampaknya akan lebih terbantu bila dilihat sebagai sistem nilai dan ajaran maupun sebagai realitas sosial.²³ Sebagai sistem nilai dan ajaran, ia bersifat Ilahiah dan karenanya sekaligus transenden. Sebagai realitas sosial, Islam adalah fenomena peradaban dan kultur dalam kehidupan manusia. Islam dan realitas sosial bukan hanya sejumlah doktrin yang bersifat universal dan kontekstual, namun juga mengejawantahkan dirinya dalam institusi-institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.²⁴ Hal ini dapat dipahami mengingat Islam-melalui Al-Qu'an yang menjadi rujukan utamanya-diyakini selalu mengarahkan manusia dengan petunjuk yang lurus, yaitu petunjuk yang akan membawa kepada kebenaran dan suasana kehidupan yang lebih baik.²⁵ Dengan kata lain, terlepas dari bagaimana wujud kongkretnya, Islam adalah agama yang amat berkepentingan untuk

²² Bahtiar Effendy, *Re-Politisasi Islam; Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, Mizan, Bandung, 2000. h. 125.

²³ Azyumardi Azra, 1996. *Pergolakan Politik Islam; dari fundamentalisme, modernisme, hingga post-modernisme*. Jakarta: Paramadina. Bagian pertama.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ahmad Syafii Maarif, 1996. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 10.

“membumikan” pesan-pesan moralnya dalam konteks kehidupan kolektif manusia.²⁶

Sejalan dengan uraian tersebut, M. Dawam Rahardjo²⁷ mengungkapkan, bahwa Islam pertama-tama adalah suatu keyakinan, suatu iman seperti dicontohkan Nabi Ibrahim, seorang yang disebut *hanif* (cenderung kepada kebenaran) dan orang yang menundukkan diri kepada Allah (muslim). Akan tetapi, menurut Dawam, Nabi Ibrahim tidak hanya menjalankan keyakinan itu untuk diri sendiri melainkan juga untuk dipeluk masyarakat. Dengan demikian, terjadi evolusi dari aqidah menjadi syariat, dari sebuah keyakinan menjadi sebuah sistem kemasyarakatan.

Berkaitan dengan fenomena kontemporer, Islam dewasa ini telah mewujudkan diri kedalam sejarah.²⁸ Perwujudan itu mengambil dua bentuk, yakni sebagai sistem keagamaan transendental yang ideal dan sebagai realitas sejarah. Dalam wujudnya yang pertama, ia dicerminkan oleh ilmu-ilmu keislaman sebagai hasil interpretasi para ulama dan cendekiawan atas Al Qur'an dan teladan Nabi Muhammad SAW. Sebagai realitas sejarah ia dicerminkan oleh kebudayaan, peradaban, dan masyarakat Islam. Di antara dua wujud tersebut ada *gap*, yakni antara Islam-ideal dan Islam-historis yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan proses kesejarahan. Bagi dunia Islam, Abad pertengahan merupakan masa yang terang benderang, sementara pada saat yang sama, dunia lain yakni Eropa (Barat) justru tengah mengalami abad kegelapan (*the dark age*).²⁹ Kreativitas dan dinamika umat Islam menjadi ciri masa ini. Ketika itu, peradaban dan

²⁶ Ahmad Syafii Maarif, 1996. Islam dan Politik; Teori belah bambu masa demokrasi terpimpin (1959-1965). Jakarta: Gema Insani Press. Hlm. 138-139.

²⁷ M. Dawam Rahardjo, 1996. Ensiklopedi Al Qur'an; tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci. Jakarta: paramadina. Terutama bagian "Islam".

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ahmad Syafii Maarif, 1993. Peta bumi Intelektualisme Islam di Indonesia. Bandung: Mizan. Hlm. 24.

ilmu pengetahuan berkembang demikian pesat. Keadaan ini berlangsung kira-kira lima abad.

Berbarengan era moden di Barat setelah mengalami zaman kegelapan, umat Islam setelah mengalami lima abad kejayaannya justru mengalami kemandekan dan kemunduran. Terutama pada abad ke-17, 18, dan 19, umat Islam berada dalam keadaan terjepit.³⁰ Dalam bahasa Azyumardi Azra, era yang disebut era moden ini merupakan masa krisis terberat dalam sejarah Islam.³¹ Keadaan ini disebabkan dua hal, yakni adanya suasana *malaise* di kalangan Islam dan terutama adanya kontak dan benturan dengan Barat (politik dan militer) yang makin meningkat sejak akhir abad ke-18.

Abad ke-19 dapat dianggap sebagai titik kemunduran umat Islam.³² Kalau pada abad ke-17 dan ke-18 sejarah Islam ditandai dengan perpecahan yang terjadi dalam pemerintahan Kesultanan Islam dan kemerosotan dunia Islam secara umum, maka pada abad ke-19 itu merupakan fase atau periode hilangnya kekuasaan Islam dan mereka berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial.³³

Keadaan krisis itu membuat umat Islam harus memberikan respon. Para cendekiawan muslim yang merupakan tokoh-tokoh pemikir Islam berupaya mencari penyebab dan solusianya.³⁴ Di antara mereka yang terkenal adalah Muhammad Ali Pasya, Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridho, Ali abd. Al-Raziq dan juga

³⁰ M. Rusli Karim, 1997. HMI MPO Dalam kemelut Modernisasi politik di Indonesia. Bandung; Mizan. Hlm. 127.

³¹ Azyumardi Azra, *Op. Cit.*; Lihat juga Azyumardi Azra, 1993. "Islam dan Negara: Eksperimen dalam masa modern; Tinjauan Sosio-Historis", dalam *Ulumul Qur'an* No. 2 Vol. IV. Hlm. 10-16.

³² Azyumardi Azra, *Op.Cit.*; Lihat juga Azyumardi Azra. 1993., *Islam dan Negara: Eksperimen dalam masa modern, tinjauan sosio-historis.*, Dalam *Ummul Quran* No.2 Vol. IV. Hlm. 10-16.

³³ John O. Voll, 1997. *Politik Islam, Kelangsungan dan perubahan di Dunia Modern*, terj. Ajat Sudrajat, Edisi I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press. Hlm.59.

³⁴ Harun Nasution, 1996. *Pembaruan dalam Islam, Sejarah, Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang.

para pengikut Abduh di Mesir. Nama lain yang dapat disebut disini adalah Sultan Mahmud II, Tanzimat, Sayyid Ahmad Khan, Amir Ali, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Ali Jinnah. Secara umum mereka ini menyimpulkan bahwa penyebab kemunduran Islam itu adalah: 1) kesalahpahaman umat Islam terhadap agamanya sendiri, dan agar dapat maju umat harus kembali kepada ajaran Islam yang murni; 2) secara politik pada satu sisi, kemunduran umat Islam disebabkan oleh imperialisme Barat, dan disisi lain, adanya pemerintahan yang dikontrol di kawasan Islam sendiri. Oleh karena itu, umat Islam haruslah secara bersama-sama bangkit melawan imperialisme, menguasai sains barat modern, dan mengadakan reformasi politik.³⁵

Analisis dan solusi yang ditawarkan kaum cendekiawan muslim ini, selanjutnya diikuti dengan berbagai gerakan. Inilah yang dikenal sebagai gerakan kebangkitan Islam. Gerakan Kebangkitan Islam pada dasarnya adalah suatu gerakan yang dilandasi oleh suatu pandangan kaum muslim bahwa Islam akan menjadi penting kembali.³⁶ Masa lalu Islam yang gemilang dianggap mempengaruhi pemikiran kaum muslim masa kini sehingga pada masa mendatang Islam akan menjadi alternatif. Gerakan Kebangkitan Islam ini terus berlangsung dan bergema hingga abad ke-20 ini.

Uraian di atas menunjukkan kepada kita beberapa hal. *Pertama*, fenomena kebangkitan Islam merupakan upaya koreksi umat Islam atas sejarahnya sendiri yang ketika itu tidak lagi bersesuaian dengan masa lalunya yang gemilang dan ternyata juga tidak mampu berhadapan dengan peradaban modern (karena bersentuhan dengan Barat dan masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi modern). Seperti ungkapan Yusril, fenomena tersebut menunjukkan, bahwa Islam selalu menampilkan dirinya ke dalam

³⁵ Djayadi Hanan, 2006. *Grakan Pelajar Islam ; Di bawah Bayang-Bayang Negara*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 21.

³⁶Chandra muzaffar, 1993.*Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global Dengan Ilustrasi Dari Asia Tenggara*, dalam Saiful Mujani (ed.), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES. Hlm. 58-103.

wajah-wajah yang berbeda sepanjang sejarah masyarakat pendukungnya.³⁷ Baginya hal ini logis saja mengingat Islam sebagai doktrin yang universal,- secara internasional-memiliki dinamika di dalam dirinya sendiri. Hal tersebut senantiasa terbuka untuk ditafsirkan ulang sejalan dengan perubahan zaman. Gerakan seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai gerakan modernisme (pembaruan) dalam Islam.³⁸

Kedua, persentuhan kaum muslimin dengan peradaban Baratmodern tersebut mau tidak mau juga memunculkan fenomena modernisasi baik dalam pengertian konseptualnya maupun secara sosial. Gerakan Kebangkitan Islam dalam hal ini dapat dipahami sebagai respon atau reaksi atas modernisasi. Dalam konteks ini pula, kebangkitan Islam dapat dipahami sebagai upaya memajukan masyarakat Islam (menjadi modern) atau sebagai upaya menjaga agar nilai-nilai modernisasi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Ketiga, Gerakan Kebangkitan Islam itu juga tumbuh dalam konteks dominasi politik Barat terhadap dunia Islam. Jadi, dapat dipahami sebagai reaksi atas dominasi politik Barat. Di negeri Barat, instrumen politik yang paling pokok adalah negara-bangsa (nation-state) dengan nasionalisme sebagai dasar solidaritas tertingginya.³⁹ Konsep dan instrumen ini merupakan hal yang a-historis (asing) bagi dunia Islam. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan kalau kemudian terjadi perdebatan mengenai hubungan Islam dengan konsep dan sistem politik kenegaraan di kalangan pemikir maupun penguasa muslim.

Gaung kebangkitan Islam dengan fenomena gerakan modern (pembaruan) dan upaya menghadapi penetrasi Barat dengan fenomena

³⁷ Yusril Ihza Mahendra, 1995. *Keharusan Demokrasi? Komentar Terhadap Facchry Ali*, dalam *Ulmul Qur'an* No. 1 Vol. VI Th. 1995.

³⁸ Harun Nasution, Op.Cit., hlm. 11-12.

³⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan*.Op.Cit. hlm. 10.

modernisasi dan negara-bangsa-nya itu juga terjadi di Indonesia.⁴⁰ Terutama sejak awal abad ke-20 seluruh dunia Islam sedang gencar berupaya melepaskan diri dari penjajahan asing. Di Indonesia, umat Islam sedang berjuang melepaskan diri dari penjajahan Belanda.

⁴⁰Azyumardi Azra menunjukkan bahwa Islam di Indonesia dengan pusat-pusat dunia Islam memang telah memiliki jaringan sejak lama, terutama sejak abad ke-17 dan 18. Sehingga perkembangan-perkembangan di pusat-pusat Islam tersebut dapat diketahui dan berkembang pula di Indonesia. Lihat Azyumardi Azra, 1995. Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Salahsatu alasannya adalah gejala yang diteliti lebih merupakan gejala sosial yang dinamis. Selain itu *subject matter* (materi) dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan dinamika pemikiran dan perilaku atau aksi kolektif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Hizbu Tahrir (HTI).

Dalam Penelitian ini, sesuai dengan tujuan serta konseptualisasinya maka penulis ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam gambaran tentang fokus penelitiannya yaitu pada gerakan yang mengusung cita-cita ideologi-politik baik secara struktural maupun kultural. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan eksploratif untuk mengetahui tujuan dan kerangka logika di atas.

Data yang dikutip dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif-analitik, yaitu tidak hanya memberikan deskripsi mengenai fenomena yang diteliti, tetapi juga menguraikan, menganalisis dan membincangkan sehingga dapat menilai secara lengkap, terperinci, dan mendalam mengenai fenomena yang diperoleh dari lapangan.

a. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.

Lokasi yang dipilih dalam Penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan dipilihnya daerah ini sebagai tempat Penelitian adalah; *pertama*, termasuk daerah yang paling banyak kader PKS dan Hizbu Tahrir dan sangat berpengaruh. Partai-partai Islam dan gerakan-gerakan Islam turut mempengaruhi konstalasi politik lokal. Hal ini terbukti dengan hadirnya beberapa gerakan Islam, baik yang radikal maupun yang moderat. Perjuangan penegakan syariat Islam dan bahkan negara Islam juga (pernah)

muncul dari beberapa gerakan Islam yang ada di Sulawesi Selatan; *kedua*, Mempunyai akar sejarah pemerintahan yang beragam dan proses Islamisasi yang kuat dengan masyarakat yang plural; *ketiga*, Perlawanan terhadap kolonial dan pemerintah dengan hadirnya kerajaan-kerajaan Islam dan DI/TII Kahar Muzakkar pernah terjadi; *keempat*, tingkat pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan politik khususnya pemilu tergolong cukup tinggi; *kelima*; partai-partai Islam tidak pernah menang meskipun mayoritas penduduknya Islam.

Selanjutnya, kenapa memilih PKS dan HTI, antara lain alasannya adalah HTI dan PKS sama-sama diuntungkan oleh perkembangan politik di Indonesia, yang mana hambatan ideologi tersebut tidak lagi ditemukan saat sekarang ini (era reformasi). Hal tersebut terjadi karena keduanya pernah dihambat secara ideologi ketika rezim Soeharto berkuasa. Meski PKS belum lahir pada saat itu, akan tetapi PKS mempunyai organisasi massa yang kemudian menjadi embrio terbentuknya PKS kemudian hari. Organisasi-organisasi tersebut seperti Lembaga Dakwah Kampus, KAMMI, dan lain-lain yang pernah dihambat oleh Orde Baru. Pasca Orde Baru HTI dan PKS (partai-partai Islam amnya) lebih leluasa mempertegas ideologi dan berupaya memperluas basis massa serta jaringan sehingga banyak kalangan mulai mengenal, bahkan menjadi anggota, atau setidaknya bersimpati dengan ide-ide dan gerakannya. Salah satu tempat-tempat potensial yang sering dijadikan sasaran memperluas pengaruh HT dan PKS adalah kampus-kampus umum seperti yang terjadi di ibu kota Sulawesi selatan yaitu Makassar. Sebagian besar anggota PKS dan HT adalah mahasiswa yang sedang studi di universitas. Di Sulawesi selatan paling banyak diminati mahasiswa sebagai tempat untuk belajar khususnya Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan lain kenapa Sulawesi Selatan menjadi *locus* penelitian.

Adapun *unit analisis*-nya adalah organisasi/kelompok. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan yakni teori gerakan sosial, bahwa teori gerakan sosial menggunakan unit analisis kelompok bukan individu.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena ini adalah penelitian lapangan (*field research*) maka dari segi teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari data utama. Dalam kajian ini, data primer yang digunakan adalah kaedah wawancara. Sumber wawancarapenelitian ini adalah para pakar yang autoritatif mengenai fokus yang diteliti di indonesia termasuk beberapa pakar di kalangan intelektual di Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan agar maklumat yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Mereka juga adalah punya kualitas pemikiran, analisis yang baik. Dalam proses wawancara, penulis menggunakan format semi-terstruktur, yaitu sejumlah topik inti diajukan dalam wawancara, tapi keluwesan dalam mengajukan pertanyaan tetap ada. Oleh itu, penulis menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended*).

Data primer yang utama didasarkan pada keputusan-keputusan resmi PKS (DPP PKS) sebagai lembaga politik, ketentuan organisasi, pernyataan resmi yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang disimpan dalam arsip organisasi dan sikap-sikap resmi PKS, baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan. Semua dokumen dan hasil wawancara dimaksud sebagai upaya untuk merekonstruksi berbagai kejadian yang berkaitan dengan faktor kausal, kondisional. Kontekstual dan berbagai komponen lain yang terkait sehingga memberikan gambaran mengenai model pendidikan politik yang dilakukan oleh PKS sekaligus pengaruhnya pada transformasi dari gerakan dakwah ke partai politik

Studi ini akan memadukan studi sejarah dan pendekatan kontekstual dengan melakukan kajian terhadap dokumen, notulen sidang, arsip dan

penerbitan yang dikeluarkan oleh partai keadilan sejahtera (buku-buku, majalah/buletin yang dikeluarkan oleh partai, bayan partai) wawancara tidak formal dengan tokoh-tokoh / elit-elit PKS dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari objek studi, artinya wawancara dilakukan untuk keperluan mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informasi.⁴¹ Individu yang menjadi sasaran wawancara disebut informan. Mereka dipilih karena dianggap dapat memberikan informasi atau keterangan tentang hal yang di wawancarakan. Penentuan tokoh-tokoh/elit-elit dari PKS dan HT yang akan di wawancarai seperti digambarkan oleh Robert D. Putnam dalam kategori kelompok elit posisional, elit reputasional dan elit keputusan.⁴²

Sementara data sekunder diperoleh—terutama dari penerbitan-penerbitan yang memiliki keterkaitan dengan PKS dan HT seperti penerbitan yang dilakukan oleh Humas DPP PKS, Majelis Syuro DPP PKS serta sama halnya dengan HT. Data sekunder juga akan dipergunakan dari media umum, hasil-hasil studi para sarjana yang telah diterbitkan, dalam berbagai media massa, jurnal-jurnal, buku-buku, majalah-majalah, makalh-makalah, skripsi, tesis dan disertasi yang sesuai dengan bahan kajian dalam studi ini serta berbagai laporan-laporan lain yang belum diterbitkan. Selanjutnya, langkah pertama yang dilakukakn peneliti untuk menginventaris data adalah dengan melakukakn pra-survey. .

c. Pengolahan Data dan Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan sistem pengolahan yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dengan analisis kualitatif. Proses analisa data meliputi:

⁴¹Koentjaraningrat, metode-metode penelitian masyarakat, (jakarta: gamedia,1994) 130.

⁴² Robert D Putnam, Studi Perbandingan Elit Politik, dalam Mohtar mas'oe'd dan Colin Mac Adrews, Perbandingan Sistem Politik (Yogyakarta: gadjahmada University press, 2000,h/91.)

- a. Menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber yaitu pustaka, observasi/pengamatan dan wawancara
- b. Mereduksi data yaitu merangkum dan memilih data pokok yang difokuskan pada hal penting kemudian dicari temanya
- c. Mengkategorisasikan data sambil melakukan koding dan mengadakan pemeriksaan keabsahan data
- d. Menarik kesimpulan atau verifikasi data yang berkaitan dengan interpretasi peneliti berupa penjabaran makna dari data yang ditampilkan.

BAB IV

AKTIVISME PARTAI KeadILAN SeJAHTERA (PKS) DAN HIZBU TAHRIR INDONESIA (HTI)

A. Islamisme di Sulawesi Selatan: perspektif teori gerakan sosial

Dalam konteks Sulawesi Selatan, Islam menjadi bagian penting dalam pemerintahan negara, Islam menjadi agama mayoritas dalam kehidupan masyarakat. Hingga saat ini pun masyarakat Sulawesi Selatan sering diidentikkan dengan Islam, bahkan jika Aceh dikenal dengan serambi Mekkah, maka orang-orang Sulawesi Selatan mengidentikkan daerahnya sebagai Serambi Madinah.⁴³ Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya adalah Islam ditambah lagi dengan akar Islamisasi yang telah ada sejak zaman kerajaan dahulu, maka sangat wajar kalau pola-pola Islamisme selalu ada, dan bahkan berpengaruh kepada politik lokal.

Pola Islamisme di Sulawesi Selatan sendiri secara garis besar terdapat setidaknya dua pola yaitu pola Islamisme yang ada di dalam institusi negara (struktural kekuasaan negara) dan pola Islamisme yang ada di luar institusi negara. Pola Islamisme yang ada di dalam institusi negara (struktural negara), *pertama*, pola para Datuk yang sukses mengislamkan raja-raja di Sulawesi Selatan; *kedua*, pola Partai-partai Islam yang telah ada sejak orde lama sampai sekarang seperti Syarikat Islam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Sedangkan Pola Islamisme yang ada di luar institusi formal negara, yaitu *pertama*, yakni pola Kahar Muzakkar yang melakukan pemberontakan/perlawanan kepada pemerintah yang bertujuan mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII); *kedua*, pola Komite Persiapan

⁴³Istilah “Serambi Madinah” telah menjadi isu dan bahkan istilah baru orang Sulawesi Selatan. Selain menunjukkan bahwa daerah ini memiliki nilai historis wilayah sebagai komunitas umat Islam yang kuat sebagaimana halnya Aceh.

Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang sebahagiandapat dipandang sukses dengan menggunakan pendekatan stuktural politik. *Ketiga*, pola Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) yang konsisten dengan perjuangan khilafahnya, serta gerakan-gerakan Islam yang lain yang mengusung perjuangan pemurnian Islam sesuai pandangan Islamisme masing-masing.

Di dalam pola-pola Islamisme di atas, ada varian-varian Islamisme yang tidak tunggal, Islamisme berwajah sangat jamak yang tentu memerlukan kajian yang serius untuk menunjukkan varian-varian itu, varian itubolehdilihat dari aktivisme beberapa gerakan Islam yang ada khususnya di Sulawesi Selatan. Selain itu, boleh dilihat dalam pendekatan struktural (kekuasaan) dengan melihat kebijakan politik pemerintah, baik provinsimaupun kabupaten terkait cita-cita ideologi-politik Islam yang mengusung formalisasi syari'at Islam dalam institusi pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Formalisasi syariah dan perjuangan negara Islam adalah bukan suatu hal yang baru dalam masyarakat Sulawesi selatan. Kahar Muzakkar adalah tokoh yang dianggap sebagai orang yang "berjihad" memperlakukan kembali syariat Islam sebagai wujud penolakan atas pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan terhadap pengaruh komunis di Sulawesi Selatan pada awal tahun 1951-an yang terkenal dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Selanjutnya adalah perjuangan atau gerakan penegakan syariat Islam KPPSI. Bagi KPPSI, bahwa demi tegapnya syariat Islam secara formal harus melalui dakwah politik dan politik dakwah diiringi tarbiah dan jihad secara konstitusional, demokratis dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk mewujudkan legitimasi (secara formal) institusionalisasi Islam dalam bentuk undang-undang Otonomi Khusus Pemberlakuan Syariat Islam di Propinsi Sulawesi Selatan sebagai rumah politik, sedang para cendekiawan, pakar, tokoh umat dan pemimpin lembaga-lembaga Islam mengisi rumah politik tersebut dengan

aturan-aturan, manhaj, hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga perjuangan itu berjalan secara simultan dan bersinergi.⁴⁴

Selanjutnya gerakan yang paling berpengaruh juga adalah Hizbu Tahrir Indonesia (HTI). Bagi HTI, Khilafah adalah sebuah solusi masalah bangsa. Kaum Muslim telah hidup sepanjang kurun yang lama di bawah naungan negara Khilafah, yang memberlakukan hukum-hukum syara' kepada mereka dalam seluruh aspek kehidupan, serta mengemban dakwah kepada seluruh umat manusia melalui jihad *fi sabilillah*, sehingga terjadilah berbagai pembebasan dan kemenangan. Bahwa dengan sistem Khilafah itulah semua urusan umat Islam ini berhasil disatukan, dan itulah yang akan mempersatukan umat, menaungi dan melindunginya.⁴⁵

Kehadiran gerakan Islam di Sulawesi Selatan secara sosiologis hadir dalam konteks dan manifestasi yang kompleks, baik yang melekat dalam dinamika internal umat Islam, maupun dalam struktur kehidupan masyarakat Indonesia secara eksternal. Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang bersifat sosiologis yang memberikan dorongan sekaligus menjadi lahan subur bagi tumbuhnya gerakan Islam yang cenderung melakukan Islamisasi yang formalistik dalam negara dengan karakternya yang legal-formal, doktriner, dan militan. Kehadiran gerakan-gerakan Islam ideologis seperti yang diperlihatkan oleh HTI, KPPSI, dan kelompok-kelompok penegak formalisasi syariat Islam di Sulawesi Selatan tentu memunculkan tanda tanya kepada publik terkait yang mendasari kemunculan dasar gerakan mereka.

Ekspresi politik dan ideologi politik Islam dalam berbagai variannya seperti yang telah dijelaskan di atas akan mempengaruhi cara-cara yang

⁴⁴Butir-butir pernyataan Hasil Kongres II Umat Islam Sulawesi Selatan tentang dasar historis Penegakan syariat Islam tersebut sebenarnya terdiri atas delapan butir yang memuat dalam poin "A. Dasar Historis dan Kultur" (butir 1 sampai 4), tetapi empat butir lainnya merupakan dasar kultural yaitu dari poin ke-5 sampai ke-8.

⁴⁵Muhammad Rahmat Imdadun, *Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980-2002: Studi atas Gerakan Tarbiyah dan Hizbu Tahrir Indonesia*, Tesis Master, UI, Jakarta, 2003. Hal. 76

digunakan oleh para aktivis politik Islam termasuk di Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, yang paling menonjol adalah apakah cita-cita politik Islam seperti itu harus diupayakan melalui instrumen-instrumen politik formal dengan menggunakan partai-partai politik, parlemen atau birokrasi sebagai ajang permainan politik. Sebaliknya, apakah tidak ada cara-cara lain juga boleh ditempuh, misalnya dengan melibatkan berbagai lembaga swadaya Masyarakat, atau organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, sehingga memungkinkan proses diversifikasi makna politik terjadi. Kalaupun harus menggunakan partai politik sebagai instrumen untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan Islam, apakah harus dibatasi pada partai-partai politik yang secara formal mempunyai asal-usul sosial dan “teologis” Islam, atau sebaliknya tetap menggunakan partai-partai yang secara formal “tidak bercirikan” Islam.

Pertanyaan-pertanyaan mendasar di atas mencuat kepermukaan ketika fenomena Islamisme di Sulawesi Selatan pasca reformasi semakin memperlihatkan eksistensinya. Setidaknya terdapat beberapa kelompok-kelompok Islamis yang semakin memperlihatkan aktivismenya, baik yang berada di dalam institusi formal maupun di luar institusi formal negara. Isu-isu tentang penegakan syariah dan penegakan syariah Islam yang di perjuangkan oleh kelompok-kelompok Islamis tentu akan sangat berpengaruh ke atas politik lokal atau pendemokrasian khususnya di Sulawesi Selatan.

Dalam dinamika politik lokal, partai Islamis yang paling sukses adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah bertarung melalui mekanisme demokrasi elektoral dan prosedural. PKS adalah partai Islam terbesar di Indonesia. Pada pilihan raya 2009, PKS menjadi satu-satunya partai Islam yang sukses menaikkan dukungan elektoral di tengah merosotnya performa elektoral partai-partai Islam dan Partai Nasionalis akibat melonjaknya suara partai demokrat. Sama ada dengan Hizbu Tahrir Indonesia (HTI) sebagai gerakan Islamis yang mempunyai basis kader yang sangat banyak khususnya

di Sulawesi Selatan yang pengurusnya sampai pada tingkat desa/kelurahan. PKS dan HTI merupakan dua organisasi Islamis yang berada di wilayah intra-parlemen dan Ekstra-Parlemen yang tentu sahaja sangat berpengaruh dalam kondisi sosial-politik lokal. Gerakan Islamis yang dilakukan oleh keduanya telah menarik untuk diteliti khususnya tentang hubungan antara Islamisme dan demokrasi.

Dalam konteks era reformasi, baik HTI maupun PKS keduanya sangat diuntungkan dengan perkembangan politik mutakhir di Indonesia karena hambatan ideologi seperti dialami di zaman orde baru tidak lagi ditemukan. Meski PKS baru lahir setelah orde baru, tetapi PKS terbentuk dari organisasi-organisasi Islam yang sebelumnya dihambat oleh Orde baru.

1. *PKS: Sebagai Gerakan Sosial*

Pemahaman yang lebih komprehensif tentang PKS akan tampak ketika kita membuka halaman sejarah partai Islam ini. Setidaknya akan dijelaskan tiga tahap pembentukan dalam gerakan sosial PKS sampai ke tingkat pelembagaan politik formal. Tahap *pertama*, adalah fase dakwah kampus; *kedua* adalah pembentukan gerakan mahasiswa; dan *ketiga* adalah gerakan politik. Berhubung sejarah dasar pendirian PKS bermula dari gerakan dakwah, maka penjelasan sistematis mengenai strategi partai dalam mendekkan agenda-agenda Islamisme penting untuk dikupas disini. Analisis mengenai mutasi PKS dari organisasi gerakan sosial menjadi partai politik akan dikembangkan pada lebih jauh dibahas pada bab selanjutnya. Tiga tahap perkembangan PKS tersebut adalah:

Pertama, **Gerakan dakwah kampus**. Bahwa asal usul PKS dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus. Dakwah kampus meliputi serangkaian kegiatan yang menyeru pada agama yang dilakukan oleh dan untuk kalangan mahasiswa di kampus. Munculnya dakwah kampus itu sendiri

dapat dimaknai sebagai reaksi terhadap ketidakramahan dan tindakan represif Soeharto terhadap kelompok “Islam Politik” yang terlihat sejak menit pertama setelah Soeharto berada ketumpuk kekuasaan. Soeharto enggan merehabilitasi partai politik Islam terbesar, Masyumi. Masyumi dilarang oleh rezim Soekarno pada 1960 dan memiliki agenda mendirikan negara berdasar ideologi Islam.

Sejak rezim Soeharto berkuasa banyak elit politik Islam yang menyadari akan ketidaksukaan rezim terhadap gerakan “Islam Politik”, beberapa mantan tokoh dan elit Masyumi yang dipelopori Muhammad Natsir lalu mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Fokus lembaga dakwah ini awalnya pada usaha-usaha serius dalam menyiarkan dakwah di tengah gencarnya penetrasi kegiatan misionaris Kristen.⁴⁶ Adapun tujuan utama “Islam Kultural” adalah menolak agenda “Islam politik”. Kubu “Islam kultural” melakukan redefinisi antara agama dan politik dan mendorong toleransi antar umat beragama. Sebaliknya DDI adalah pendukung paling vokal gerakan “Islam politik” yang gencar mengabarkan bahwa Islam bukan sekedar agama atau konstruksi teologis, melainkan juga ideologi politik. Pada Agustus 2000, delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masymi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945 sekalipun akhirnya ditolak.⁴⁷

Agenda religio-politik DDII tidak hanya menghadapi kubu “Islam kultural” tapi juga secara politis berbenturan dengan platform rezim Soeharto yang tidak mentolerir “Islam Politik”. Dilema yang dihadapi DDII ini kemudian mendorong tokoh-tokohnya untuk mengubah perkarauan strategi, lebih memilih jalur revitalisasi dakwah dengan membidani proses kelahiran

⁴⁶Burhanuddin Muhtadi, “The Conspiracy of Jews: The Quest for Anti-Semitism in Media Dakwah”, *Graduate Journal of Asia pasific Studies*, 5:2 (2007).

⁴⁷ Zuly Qodir, HTI dan PKS menuai kritik; Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia, JKSG, Yogyakarta, 2013. H. 133.

gerakan sosial Islam yang lebih cair di kampus-kampus. Kampus dianggap relatif kurang dikontrol oleh negara. Masjid-masjid dikampus sengaja dipilih sebagai markas gerakan sosial Islam yang dibina DDII di universiti-universiti sekuler.⁴⁸ Tokoh-tokoh DDII secara sadar menjadikan mahasiswa dari kampus sekuler sebagai kelompok sasaran untuk melawan pengaruh pemikiran-pemikiran yang dikembangkan para pendukung “Islam kultural”.

Sejak awal 1980-an metode dakwah kampus dengan istilah *usrah* sudah diperkenalkan (*usrah* bahasa Arab yang berarti “keluarga”) dan mulai melakukan pengaturan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya dengan sistem dan program yang lebih sistematis.⁴⁹ Adapun Usrah itu sendiri adalah kelompok-kelompok kecil yang saling berhubungan secara dekat serta melalui struktur hierarkis. Di lapangan kebanyakan anggota usrah tidak mengenal anggota-anggota di kelompok *usrah* lain. Dari struktur organisasi semacam ini, dakwah kampus berkembang pesat dan masjid-masjid kampus sejak saat itu menjadi pusat aktivitas mahasiswa. Dalam metodenya, model gerakan tarbiyah ini dirancang sangat terstruktur (terorganisasi), berjenjang secara rapi. Pengorganisasian dan pembentukan paham Gerakan tarbiyah mengacu pada apa yang pernah dilakukan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai embrionya.⁵⁰ Dalam penggunaan *usrah* (sistem sel/) dalam program pelatihan keagamaan di kegiatan kampus mengadopsi sistem pengkaderan Ikhwanul Muslimin Mesir. Hubungan dakwah kampus dengan Ikhwanul Muslimin juga difasilitasi melalui para pemimpin mahasiswa yang berperan sebagai agen-agen sosialisasi dengan menawarkan karya-karya monumental para tokoh Ikhwanul Muslimin sebagai referensi utama dalam kajian.

⁴⁸Yudi latif, “The Rupture of Young Muslim Intelligensia in the Modernization Indonesia”, *Studia Islamika*, Vol 12, No. 3, 2005,391.

⁴⁹Diskusi yang lebih lengkap mengenai program-program pelatihan, lihat DPP PKS, Manajemen tarbiyah Anggota Pemula, PKS & Syamil Cipta Media, Bandung, 2003. Dalam Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS*...h.101

⁵⁰ Zuly Qodir, HTI dan PKS:.....h.133

Kedua, Pelembagaan Gerakan Mahasiswa. Secara sosio-antropologis, dakwah kampus makin berkibar seiring dengan momentum dan semangat kebangkitan islam yang muncul di kalangan masyarakat terdidik, terutama mahasiswa-mahasiswa di Universiti sekuler pada 1970-an.⁵¹ Tumbuh gejala baru dikalangan mahasiswa untuk mempelajari agama disela-sela perkuliahan mereka. Tidak menghaerankan kemudian masjid-masjid kampus menjadi pusat aktivitas dakwah, dan dihadiri banyak mahasiswa yang ingin ikut serta di dalam lingkaran kecil untuk belajar agama.

Pada akhirnya dakwah kampus kemudian bermetamorfosis menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang resmi, yaitu Lembaga Dakwah Kampus (LDK). LDK adalah strategi yang paling baik bagi para aktivis dakwah dalam rangka memperluas jejaring, rekrutmen dan organisasi. Pada awalnya, pemikiran teologi dan model aktivisme LDK diambil dari gagasan-gagasan Ikhwan Hasan al-Banna dan Jamiat Islami al-Mawdudi. Intisari pemikiran ikhwan dan Jamiat Islami bertumpu pada argumen bahwa Islam adalah *al-din*: jalan hidup yang total, komprehensif, dan merangkum semua aspek kehidupan tanpa menarik batas pemisah antara *aqidah wa syariah* (akidah dan syariat), *din wa dawlah* (agama dan negara), dan *din wa dunya* (ukhrawi dan duniawi).⁵²

Pada perkembangan selanjutnya, beberapa aktivis LDK mengumumkan pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Peran KAMMI kemudian sangat dipertungkan terutama ketika menjelang kejatuhan rezim soeharto. KAMMI muncul sebagai gerakana mahasiswa yang paling vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan publik melalui aksi-aksi demonstrasi di seluruh pelosok negeri di Indonesia. KAMMI aktif menggelar protes untuk mendesak agenda reformasi.

⁵¹Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, KPG, Jakarta, 2012. Hlm. 38.

⁵²Muhtadi, *Dilema PKS:...*, hlm. 41.

Ketiga, Gerakan politik. pada tanggal 21 Mei 1998 ketika Soeharto turun, tokoh-tokoh KAMMI meulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik Islam. Inisiatif ini juga didukung oleh beberapa aktivis dakwah kampus yang berpandangan bahwa jejaring dan sumber daya gerakan dakwah yang telah ada seharusnya ditransformasikan kedalam partai politik. Sebuah survei internal di antara kader-kader inti gerakan ini menunjukkan bahwa mayoritas aktivis mereka setuju untuk mendirikan partai.⁵³ Partai tersebut kemudian diberi nama “Partai Keadilan” (PK), sekarang dikenal sebagai Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perlunya mendeklarasikan partai islam oleh PK lantaran didasari kekecewaan terhadap partai Islam yang telah ada, yang secara diametral sebenarnya dianggap gagal memperjuangkan nasib rakyat yang mayoritas muslim. Bahkan yang lebih esensial, partai islam yang ada dinilai kurang memegang teguh ajaran islam sebagai ruh gerakan politiknya, yang muncul hanyalah langkah-langkah pragmatis yang secara perlahan namun pasti menyingkirkan nilai-nilai islam itu sendiri dari partai islam yang ada.⁵⁴

2. PKS: Isu-Isu Ideologis

Dalam Visi dan Misi PKS sebelum “direvisi” oleh versi yang terbaru, disebutkan bahwa visi umum PKS adalah sebagai partai dakwah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa. Adapun visi khas PKS adalah memiliki pengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang Madani. Visi ini mengarahkan PKS sebagai (1) Partai Dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam

⁵³Machmudi, “*Islamising Indonesia*”, 2006. Dalam Muhtadi, *Dilema PKS*...h. 103

⁵⁴ Djoni Edward: *Efek Bola Salju Partai keadilan Sejahtera*, harakatuna, bandung, 2006. H.75

proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang; (3) kekuatan memelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil alamin; dan (4) Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Adapun misi PKS terdiri atas 7 butir, yakni (1) menyebarluaskan dakwah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anasir *taghyir*; (2) mengembangkan institusi kemasyarakatan yang Islami diberbagai bidang sebagai *markaz taghyir* dan pusat solusi; (3) membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat; (4) membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya; (5) menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam; (6) secara aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan *wahdatul-ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi; dan (7) ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedzaliman khasnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.⁵⁵

Di samping isu-isu Islamis yang tertuang dalam visi-misi diatas, di lapangan PKS juga sering menyuarakan istilah *clean and good governance* dan anti korupsi. Selama ini PKS juga berusaha menjaga akar tradisionalnya dengan merawat komitmen terhadap agenda dan cita-cita politik Islamis. Begitu juga dukungan kader-kader PKS di parlemen maupun melalui aksi-aksi demonstrasi yang menuntut peraturan daaerah bernuansa syariah di

⁵⁵Situs web rasmi PKS, <http://www.pk-sejahtera.org>.

berbagai propinsi termasuk di Sulawesi Selatan. Perda syariah ini bermacam-macam bentuknya seperti, aturan tentang berpakaian Islami di kantor-kantor pemerintahan, kewajiban membaca al-Quran, larangan minum alkohol, judi, larangan perempuan keluar malam, penertiban lokalisasi pelacuran, dan lain-lain. Meskipun beberapa tahun terakhir ini PKS dilanda banyak masalah, mulai kasus korupsi maupun terkait etika, partai ini mulai bangkit di bawah kepemimpinan Anis Matta. Presiden PKS ini sangat rutin konsolidasi ke daerah pasca guncangan di tubuh internal PKS. Oleh banyak pengamat, Anis Matta dianggap sukses dalam membangun kembali citra partai.

3. HTI di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 M/1372 H oleh Syaikh Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, seorang ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak, seorang hakim (*qadhi*) pada Mahkamah Banding di al-Quds, serta seorang politisi ulung. Beliau berasal dari sebuah “keluarga ilmu”, karena kedua orang tua beliau adalah ahli syariah Islam (*faqih*). Selain itu, kakek buyut beliau, yakni Syaikh Yusuf bin Hasan bin Muhammad an-Nabhani as-Syafi’iy, Abu Mahasin, adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa Daulah Khilafah.

HTI di Sulawesi Selatan dalam kemunculannya tidak dapat dipisahkan dari peranan jaringan Lembaga dakwah kampus (LDK) pada tahun 1990-an. Makassar, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota tujuan belajar bagi anak muda Indonesia Timur, karena kota ini menyediakan sejumlah universitas terkemuka seperti di antaranya: Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan Universiti-Universiti lainnya. Seperti diketahui, kampus menyediakan basis bagi gerakan Islam untuk berkembang melalui LDK. Di Makassar, kampus UMI dan UNM telah memiliki LDK pada tahun 1990-an

sebagai bagian dari jaringan LDK se-Indonesia, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh aktivis mahasiswa Muslim di Jawa Barat. Namun demikian, pada fase awal perkembangannya LDK merupakan organisasi longgar (loose organization) yang mengakomodasi mahasiswa dari berbagai aliran organisasi Islam. Para aktivis LDK UMI lah yang berperan penting dalam membawa ide-ide HTI dan mengembangkannya di Makassar. Ini adalah hasil interaksi intensif antara aktivis LDK UMI dan aktivis LDK di Jawa.⁵⁶

Selanjutnya, peluncuran cabang HT Makassar dirangkaikan dengan sebuah seminar mengenai Khilafah yang diselenggarakan di kampus UNHAS pada tahun 2000. Kegiatan ini mengikuti kemunculan HTI di Jakarta dengan kegiatan KOnferensi Internasional tentang khilafah pada Mei 2000 di Stadion Senayan di Jakarta. Seminar HTI di Makassar tersebut dihadiri sekitar 1.000 orang, termasuk mahasiswa dan berbagai segmen dari masyarakat. Pembicara-pembicara yang dijemput antara lain: Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah (Rektor UMI), Prof. Dr. Mattulada (sejarawan UNHAS), dan Dr. Utsman (Aktivis HTI dari Surabaya).⁵⁷ Sejak saat itu HTI beroperasi aktif di tengah masyarakat dengan mengorganisir berbagai aktivitas untuk mendakwahkan ide-idenya dan menarik dukungan public.

Sebagai bagian dari cabang wilayah HTI, Sulawesi Selatan mempunyai tingkat kepengurusan sebagai berikut: pengurus HTI di tingkat propinsi disebut dengan dewan Pimpinan Daerah 1 (DPD 1), DPD II untuk tingkat kabupaten, dan Dewan Pimpinan cabang (DPC) untuk tingkat Kecamatan. Struktur pengurus HTI DPD I terdiri dari *Lajnah Tsaqafiyah* (Departemen Kebudayaan), *Lajnah Siyasiyyah* (Departemen Politik), *Lajnah*

⁵⁶ Syamsu Rizal, Jaringan Hizbu Tahrir Indonesia di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Dalam Syafii Maarif (ed.), Perkembangan Paham Keagamaan transnasional di Indonesia. Jakarta, Puslitbang Kehidupan keagamaan, Cet. Nov. 2011. H. 20

⁵⁷ *Ibid*,

Maslahiyah (Departemen Kemaslahatan), *Lajnah Fa'liyyah* (Departemen Administrasi), dan *lajnah l'amiyyah* (departemen Informasi).⁵⁸

Di Sulawesi Selatan, perekrutan HTI berlangsung dikampus-kampus. Sarana penting bagi rekrutmen adalah dengan mengadakan program pelatihan dan seminar dalam berbagai bentuk di kampus-kampus. Meskipun demikian, bahwa sebagian besar proses rekrutmen di HTI berlangsung melalui hubungan interpersonal antara aktivis HTI dan calon anggota yang akan didekati.

4. HTI Sebagai Organisasi Gerakan Sosial dan Politik

Penegasan bahwa meskipun Hizbu Tahrir (HT) menamakan dirinya sebagai partai politik, akan tetapi secara umum HT belum bisa dianggap sebagai partai politik dalam makna sesungguhnya. Sherman dan Kolker⁵⁹ menyebutkan empat hal yang mencirikan keberadaan sebuah partai: 1) memiliki aliansi dan struktur yang tahan lama, yang terdiri atas suatu hubungan yang atabil antara kepemimpinan nasional, sub-kepemimpinan, dan partisipan aktif pada tingkat local maupun tingkat public yang lebih luas; 2) mengembangkan prosedur untuk menjalankan fungsi-fungsi politik utama seperti memenangkan pemerintahan; 3) berusaha meraih dukungan kelompok-kelompok masyarakat dan segmen pemilih yang luas, memiliki pengikut yang relative stabil, dan sangat bergantung pada fungsi keperantaraan (brokerage function) dan kompromi, yang mengikat berbagai kepentingan dan individu yang berbeda ke dalam sebuah koalisi yang terus hidup (working coalition); 4) mengartikulasikan seperangkat perspektif yang berkembang menjadi sebuah ideology.

⁵⁸ Lihat Sukma, Hizbu tahrir Daerah Sulawesi Selatan, Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas hasanuddin, 2008. Dalam Syansu Rizal, jaringan Hizbu tahrir...h.20

⁵⁹ Lihat Arnold K. Sherman & Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics*, California: Wadsworth Publishing Company, 1987. H.212-213,216

Keempat ciri di atas dapat ditemukan pada kebanyakan parpol Islam yang ada saat ini. Namun tidak semua gambaran pokok tentang partai di atas boleh ditemukan dalam HTI. Factor utama yang membezakan HTI dengan partai politik lain adalah keterlibatannya dalam pilihan raya. Selain itu, pertentangan ideology HTI dengan system yang ada juga menimbulkan keunikan tersendiri dalam HTI.

Secara umum, keberadaan HTI sebagai sebuah partai dapat diuraikan sebagaimana berikut: *pertama*, tidak seperti lazimnya partai-parti politik yang ada, kepemimpinan dan struktur partai dalam HTI merupakan sesuatu yang tertutup untuk public karena hanya boleh diketahui dan diakses oleh anggota. Ketertutupan ini dinyatakan tegas dengan fakta bahwa seluruh pengurus HTI-baik pada tingkat pusat, wilayah, maupun daerah-tidak memiliki susunan pengurus yang jelas. *Kedua*, HTI tidak menjlankan fungsi penyediaan calon-calon pemimpin atau wakil rakyat karena HTI menolak berpartisipasi dalam pilihan raya. HTI juga tidak melakukan koalisi dengan kekuatan politik manapun, melainkan hanya melakukan pendekatan dan komunikasi dakwah agar kekuatan-kekuatan politik tersebut menerima dan memasukkan gagasan-gagasannya dalam program politik mereka. Namun, untuk memobilisasi dukungan, HTI juga melakukan kampen-kampen (seperti "selamatkan Indonesia dengan Syariat") dan mengembangkan berbagai program nasional (seperti majelis Taqarrub Ilallah). HTI juga merumuskan dan mengeluarkan pernyataan prinsipil tentang isu, sikap, dan kebijakan-kebijakan, terutama yang terkait dengan kepentingan Islam dan kaum Muslim.

Ketiga, meskipun pada awalnya banyak didominasi oleh kaum muda dan mahasiswa, namun basis pendukung HTI kini semakin beragam, baik dari sisi usia, profesi, maupun latar belakang social dan ekonomi. Upaya untuk memperluas basis dukungan dari beragam lingkungan kesibukan kini terus dilakukan HTI. Namun upaya ini akan cukup terhambat oleh beberapa perkara; 1) syarat kemusliman seseorang; 2) identifikasi tentang beberapa

jenis lingkungan kesibukan yang tidak sesuai dengan syariat; 3) jenjang pengkaderan yang cukup panjang dan relative b erat sebelum menjadi anggota; 4) berbagai aspek kontraversial dan tidak populis yang terkandung dalam ideology HTI.

Keempat, setiap anggota HTI adalah kader yang sangat ideologis. Dalam berinteraksi dengan kelompok lain, mereka selalu memegang teguh pandangan-pandangan normative kelompok dan menghendaki agar gagasan dan solusi-solusi HTI diterima sebagai kata pemutus untuk berbagai persoalan yang ada. Kekentalan ideology HTI tampak dalam slogannya “Tiada kemuliaan tanpa Islam, Tiada Islam tanpa Syariat, dan Tiada Penegakan Syariat tanpa Tegaknya Khilafah Islamiyah”.

Dari pemeriksaan tentang keberadaan HTI sebagai partai politik di atas, tampaklah bahwa HTI lebih tepat untuk dilihat sebagai suatu gerakan social alih-alih sebagai partai politik.⁶⁰ Jenis gerakan social yang diterapkan HTI dapat dikenali berdasarkan tiga kategori perbezaan yang dijelaskan Harper berikut ini: gerakan yang bersifat umum (general movement), dan gerakan spesifik (specific movement), gerakan radikal (radical movement), gerakan reformasi (reform movement), serta gerakan sayap kiri dan gerakan sayap kanan.⁶¹

⁶⁰ Sebagaimana dikemukakan Heberle (1951), perbedaan paling tegas antara partai politik dan gerakan social terletak pada bahwa partai politik hanya terdapat dalam system politik, atau hanya dalam Negara, sementara gerakan social tidak harus terbatas pada sebuah negara tertentu atau masyarakat nasional tertentu. Partai terlembaga di luar system politik, sementara gerakan social merupakan alat partisipasi nonelite yang terlembaga di luaran system (extra-institutionalized). Dalam Kurniawan Abdullah, *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstra perlementer: Hizbu tahrir Indonesia*, DIALOG: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Edisi, Tahun Ke-3, 2005. h. 48

⁶¹ Charle L harper, *Exploring Social Change*, New jersey: Prentice Perkaral, 1989. H.125-129.

HTI merupakan gerakan spesifik karena mengartikulasikan sentiment muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam secara menyeluruh dan serentak melalui penegakan Negara khilafah. Dari segi tujuannya, HTI merupakan gerakan revolusioner/radikal karena bermaksud mengganti system sekuler menjadi system Islam. sedangkan dari sisi relevansi historisnya, HTI merupakan gerakan sayap kanan karena berusaha mengembalikan tatanan Islam yang telah runtuh dan berupaya memulihkan kejayaannya sebagai pusat peradaban dunia.

Sebagai sebuah gerakan sosial, HTI mentikberatkan aksinya dengan model mobilisasi yang cukup apik. Charles Tilly⁶² menyebutkan bahwa tindakan kolektif sebuah kelompok penentang dapat dianalisis berdasarkan lima komponen utama. *Pertama*, kepentingan, yakni sesuatu yang terkait dengan keuntungan dan kerugian yang diperoleh atau diderita oleh sebuah kelompok dalam interaksinya dengan kelompok lain. Dalam perkara ini, kepentingan yang diartikulasikan dan diperjuangkan HTI dalam kancah public melalui media publikasi maupun kegitannya terkait dengan tiga perkara; 1) penerimaan terhadap pemikiran HTI. Pada level terendah, penerimaan terhadap pemikiran HTI adalah berupa ketiadaan resistensi terhadap gagasan-gagasan utama HTI dan ketertarikan untuk mendalaminya lebih jauh. Penerimaan pada level tinggi adalah apresiasi dan aktualisasi ideology HTI dalam kehidupan pribadi, kelompok, dan Negara. 2) dukungan aktif terhadap kegiatan HTI. Dukungan ini boleh berbentuk mulai berpartisipasi dan kerjasama dalam kegiatan, pendanaan, keanggotaan, hingga partaisipasi aktif dalam upaya penegakan syariat dan khilafah. 3) kebijakan yang menguntungkan kaum muslim. Kebijakan-kebijakan yang dianggap menguntungkan kaum muslim adalah mulai dari penghilangan represi terhadap kaum muslim, advokasi terhadap kaum muslim tertindas, penegakan

⁶² Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, New York: Random House, 1978. Dalam Kurniawan Abdullah, *Fenomena....*.h.48

syariat, hingga perubahan system Negara menjadi system khilafah. Tiga perkara ini secara beruntun merupakan priority kepentingan jangka pendek HTI. *Kedua*, organisasi, yakni aspek-aspek dalam struktur sebuah kelompok yang berpengaruh langsung terhadap kapasitasnya dalam bertindak guna meraih kepentingan-kepentingannya. Dari segi organisasi ini, HTI boleh dikatakan merupakan organisasi yang berkembang semakin solid. Ada beberapa indikasi mengenai perkara ini; 1) efektiviti dan efisiensi organisasi, yang terlihat dari pembagian kerjanya yang cukup rapi, sentraliti kegiatan maupun kebijakannya, dan diferensiasi bidang organisasi maupun tema kegiatan; 2) loyaliti anggota, yang tampak sangat mempengaruhi intensity dan kualiti tindakan kolektifnya; 3) inklusiviti organisasi dalam memudahhi aktiviti para anggota lewat pemberian ruang-ruang yang selaras dengan kecenderungan tiap-tiap anggota. Anggota yang ingin menjadi pemikir dan ideology gerakan akan diarahkan untuk lebih banyak bergumul dengan buku-buku pegangan dan sosialisasi pemikiran, sementara anggota yang berlatar pendidikan umum dan kurang akrab dengan doktrin-doktrin ke-Islaman lebih diarahkan untuk menekuni kegiatan-kegiatan dakwah yang lebih bersifat praktis.

Ketiga, mobilisasi, yakni proses di mana sebuah kelompok berubah dari kumpulan individu-individu pasif menjadi partisipan aktif dalam kehidupan publik. Dari segi mobilisasi dan penguasaan terhadap sumberdaya –koersif (persenjataan, angkatan perang, atau teknologi canggih), utilitarian (barang-barang, layanan informasi, uang)- HTI tergolong masih lemah.⁶³ HTI hanya memiliki sumberdaya normative (berupa keanggotaan partisipasi aktif kader) dan utilitarian (iuran anggota, satu kantor sekretariat rasmi, dan terbitan dengan oplah hanya belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah). Penguasaan sumberdaya ini tergolong sangat kecil bila dibandingkan dengan

⁶³ HTI tidak punya tentara, satgas dan lain-lain seperti perkaranya dengan ormas-ormas besar Islam yang lain.

partai-partai besar di Indonesia. Dari segi cara mobilisasi yang diterapkan, HTI lebih banyak melakukan mobilisasi penyiapan (*preparatory*), di mana hanya berkonsentrasi pada pengerahan sumberdaya untuk mengantisipasi peluang dan ancaman di masa depan. Bentuk utama mobilisasi penyiapan yang dilakukan HTI adalah aktivitas penerbitan, kegiatan diskusi dan seminar, tabligh akbar, silaturahmi dan dialog dengan kelompok muslim lain, serta audiensi dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik.⁶⁴ Namun dari segi alat identifikasi, HTI tergolong sebagai organisasi yang potensial dalam melakukan mobilisasi. HTI juga telah mendefinisikan dengan baik hak-hak anggota untuk berbicara atau bertindak atas nama kelompok, memiliki control yang kuat terhadap bidang-bidang aktivitas organisasi, aktivitas anggota, dan hubungan personal para anggota, serta terus mengembangkan kepemilikan dan control atas sumberdaya utama yang dibutuhkan.

Keempat, peluang dan ancaman, yakni terkait dengan kelompok-kelompok lain, termasuk pemerintah, yang mudah menerima klaim-klaim baru sehingga, jika kelompok penentang memanfaatkannya dengan baik, akan mendukung realisasi kepentingan-kepentingannya. Sedangkan ancaman terkait dengan kelompok lain yang mengajukan klaim-klaim yang menghambat realisasi kepentingan kelompok-kelompok penentang. Dari segi peluang dan ancaman, HTI saat ini tengah menikmati ruang kebebasan yang relative luas. Pendemokrasian yang semakin baik dan kebebasan sipil yang semakin luas telah memberikan peluang lebar bagi HTI untuk berkembang pesat dan tidak lagi menjadi gerakan bawah tanah. HTI juga banyak diuntungkan oleh semakin mencairnya klaim-klaim kelompok sekuler yang sebelumnya banyak mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam radikal.

⁶⁴ Aktivitas penerbitan, kegiatan diskusi dan seminar, tabligh akbar, silaturahmi dan dialog dengan kelompok muslim lain, serta audiensi dengan pemerintah dan tokoh-tokoh politik sangat rutin diadakan di Sulawesi Selatan. Wawancara dengan Dirwan Abdul Djalil, HUMAS HTI Sulselbar. Tgl 30 September 2013. Tabligh akbar di lapangan Andi Mattalatta baru-baru ini berjumlah ribuan orang dari berbagai daerah di Sulselbar. Mulai dari kalangan anak-anak sampai orang tua.

Selain itu, system multi partai yang melahirkan beberapa parpol berbasis Islam juga turut mempersubur lahan pertumbuhan HTI. Namun di sisi lain, kelompok sekuler dalam panggung politik, apatisme masyarakat muslim terhadap gagasan khilafah, dan kes-kes terorisme yang mendiskreditkan kelompok muslim radikal tampak menjadi ancaman potensial bagi gerakan ini. Dengan tujuan utamanya berupa penggantian rezim dan system, HTI sesungguhnya sangat rentan menghadapi situasi represif.

Kelima, tindakan kolektif, yang terdiri atas orang-orang yang bertindak bersama untuk mencapai kepentingan bersama. Menurut Tilly, para penentang system politik dapat kita bezakan menjadi empat kelompok: fanatic (*zealots*), pelit (*misers*), penentang tanggung (*run-of-the-millcontenders*), dan oportunist. Tingkat represi penguasa terhadap kelompok pertama akan lebih rendah dibandingkan terhadap kelompok kedua dan seterusnya. Sebagai kelompok penentang, HTI tergolong sebagai kelompok fanatic (*zealot*). HT telah memberikan nilai sangat tinggi pada beberapa kabajikan kolektif (penegakan syariah, khilafah, dan kepentingan muslim) dan bersedia mengorbankan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapainya. HTI juga tidak menyesalkan keterlibatannya dalam pilihan raya, bahkan dalam ideology gerakannya, HT menetapkan bahwa represi dan kekerasan harus dihadapi dengan kesabaran dan keteguhan komitmen pada garis perjuangan melalui pemikiran. Pada sisi yang lain, dari segi alokasi sumberdaya untuk mewujudkan tujuan, HTI tergolong sebagai kelompok penentang yang pelit dan, kadang-kadang, oportunist kalau dibandingkan dengan kelompok Islam radikal lainnya seperti FPI, Majelis Mujahidin, Laskar Jihad, dan lain-lain. Tergolong pelit karena HT tidak mahu mengorbankan citra moderat yang didapatkannya saat ini untuk membeberkan ideology perjuangannya yang radikal.

HTI dalam mencapai visi perjuangannya terkadang dianggap radikal dengan cara revolusi (politik). Menurut Mustafa Rejai⁶⁵ revolusi politik berdasarkan targetnya dapat dikenali menurut tiga tipe: revolusi sipil, revolusi nasional, dan revolusi gagal. Sedangkan menurut kekuatan penggerak, revolusi dapat dibedakan kedalam empat tipe: revolusi dari bawah, revolusi dari atas, dan revolusi istana. Dalam konteks HTI, sudah jelas merupakan organisasi yang mengusung ide-ide perubahan revolusioner, atau dalam istilah HTI sendiri: *Taghyir*. Dari segi target revolusi yang ingin dicapai, HTI menghendaki terjadinya revolusi sipil dan revolusi nasional. Revolusi sipil yang dikehendaki HTI adalah penentangan terhadap para penguasa zalim di negeri-negeri muslim, pengungkapan atas kejahatan mereka, pengubahan perilaku mereka yang memperkosa hak-hak umat, melalaikan urusan-urusan umat, atau menyalahi hukum-hukum Islam, dan pada akhirnya, penghapusan kekuasaan mereka dan penggantian mereka dengan kekuasaan yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam. Adapun revolusi nasional yang dikehendaki oleh HTI adalah penyingkapan maker Negara-negara kafir imperialis yang menguasai negeri-negeri Islam; perlawanan terhadap segala bentuk penjajahan asing baik secara pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer, pembebasan umat dari segala bentuk pengaruh kekuasaan asing, dan pada akhirnya, penegakan kekuasaan Islam dalam tatanan Internasional.

Berdasarkan kekuatan penggerak perubahan revolusionernya, HTI mencita-citakan bentuk revolusi dari bawah. HTI meyakini bahwa motor perubahan adalah masyarakat dan keberhasilan dalam mewujudkan perubahan revolusioner sangat bergantung pada masyarakat. Kerenanya, HTI terus berupaya keras membina masyarakat agar mereka mendukung dan mengambil ide-idenya. HT terus mengembangkan gerakan massa secara perlahan-lahan dengan harapan suatu saat akan meledak menjadi

⁶⁵ Mustafa Rejai, *The Comparative Study of Revolutionary Strategy*, New York: Anchor Press, 1977. H.117

pergolakan besar yang mengarah pada perubahan politik dan social yang berjangkauan luas.

B. Identifikasi gerakan dan Pola artikulasi kepentingan

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sebagai organisasi gerakan social, PKS sangat aktif terlibat dalam memproduksi makna dan melakukan proses pembingkaiian atas apa yang terjadi terhadap kondisi umat Islam Indonesia pada khususnya, dan dominasi Barat terhadap tata kelola dunia pada umumnya. Salah satu komponen penting dalam pembingkaiian PKS adalah menuding paham liberalism Barat sebagai biang permasalahan yang menyebabkan terjadinya dekadensi moral, ketidakadilan ekonomi, dan degradasi politik. Secara spesifik, aktivis PKS menunjuk sekularisme sebagai akar nilai-nilai barat yang merusak sendi-sendi kehidupan umat Islam. Liberalisme dan sekularisme inilah yang menjadi tantangan terbesar bagi umat Muslim sedunia dalam mempraktikkan nilai-nilai Islam yang *kaffah*.

Di samping PKS melakukan proses pembingkaiian Islam sebagai solusi bagi transformasi individu dan Islamisasi Negara melalui partisipasi politik formal, partai ini juga menawarkan paket solusi selalui dua pola Islamisasi.⁶⁶ Pertama, adalah Islamisasi cultural kepada individu dan kelompok masyarakat melalui media dakwah dan pranata budaya untuk menguatkan basis cultural dan intelektualitas umat. Argument dasarnya adalah bahwa proses imperialism cultural melalui sekularisme telah merusak cara pandang umat Islam, sehingga perlu islamisasi cultural agar kembali pada jalan sesuai dengan yang ditetapkan sumber-sumber rujukan Islam (*al-ruju' ila al-Qur'an wa al-Hadits*). Islam harus dipahami secara *kaffah*, total, konfrehensif dan mencakup keseluruhan jalan hidup tanpa pemisahan antara al-din wa al-dawlah (agama dan Negara). Dengan kata lain, PKS

⁶⁶ MPP PKS, Platform, 2007. H. 48

memandang islam sebagai korpus peraturan dan petunjuk lengkap yang memberikan panduan bagi kebutuhan spiritual dan dunia (syamil). Konsepsi tersebut digabungkan dengan keyakinan bahwa Islam itu universal. Universalitas Islam inilah yang diyakini PKS sebagai dasar moral spiritual bagi pembangunan Indonesia. Islamisasi cultural ini dilakukan dengan cara gradual dan bertahap, serta memakan proses yang panjang.⁶⁷

Tipe kedua pemingkaian prognostic PKS adalah pendekatan islamisasi structural.⁶⁸ Beberapa tokoh terkemuka PKS mengakui bahwa tujuan utama PKS adalah lahirnya “ Negara yang berdasarkan pada hukum Islam”.⁶⁹ untuk diperlukan strategi structural yang sistematis dalam merealisasikan formalisasi hukum atau nilai-nilai islam melalui instrument Negara. Sebagaimana dinyatakan dalam paradigm PKS, pola structural ini mengambil bentuk partaisaipasi politik formal yang ditujukan untuk merestrukturisasi kebijakan dan institusi Negara dalam rangka menerapkan hukum Islam (syaria) di masyarakat.⁷⁰

Dalam mengintensifkan program-program ideologisnya, PKS menawarkan pemingkaian motivasional melalui program massif dan terorganisir yang disebut *dakwah ila Allah*, yang berarti “panggilan” atau “ajakan” kepada Allah.⁷¹ Mengingat PKS berupaya melakukan perubahan individual dan structural, partai ini mencoba mengangkat kembali konsep

⁶⁷ Burhanuddin Muhtadi dalam wawancaranya dengan Aan Rohana, Jakarta 4 Oktober 2013

⁶⁸ MPP PKS, Platform, 2007. H. 50

⁶⁹ Di antaranya adalah wawancara dengan mantan Presiden PKS, Tifatul Sembiring, “The PKS dan Shari’a Law”, The Jakarta Post, 8 Februari 2006. Dalam Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS...*h.169.

⁷⁰ MPP PKS Platform, 2007. H.50

⁷¹ Bagi PKS, politik adalah keahlian untuk mewujudkan sikap mengalah yang timbale balik dan mewujudkan konsesus. Maka penting melakukan pendekatan purifikasi makna politik dengan sentuhan universal yang menyatukan cakrawala kerakyatan dengan para elit di satu titik keseimbangan untuk melahirkan redefenisi tentang Negara dan politik dalam konteks dan konten yang diametral. Lihat Tamsil Linrung, Politik untuk Kemanusiaan; mainstream Baru Gerakan Politik Indonesia, Tali Foundation, 2013, dalam Kata pengantar. H. ix

dakwah tai dengan tujuan yang berbeda. Pertama, dakwah yang dimaksud juga ditujukan untuk melakukan reislamisasi terhadap umat Islam abangan. Kedua, PKS memperkenalkan muatan baru dalam materi dakwah yang menekankan tafsir Islam bukan sekedar aturan moral dan personal, tapi juga paket panduan hidup *kaffah* yang mengatur hidup di dunia dan akhirat, yang juga menawarkan resep social, politik, ekonomi dan budaya sekaligus memberikan tuntutan dalam proses transformasi kepercayaan individu dan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan Negara.⁷²

Dalam perkembangannya, PKS membedakan fase dakwah yang mencakup aktivitas dan obyek dakwah ke dalam empat tahap yang disebut orbit dakwah (*mahawir*).⁷³ setiap capaian orbit dakwah adalah mukadimah bagi tahapan dakwah berikutnya. Oleh itu, mihwar dakwah tidaklah dipahami secara diskrit, tapi kontinyu. Bagi PKS, perubahan dari satu mihwar ke mihwar berikutnya merupakan akstensi dari jenjang pengabdian dan proses kepemimpinan. Orbit pertama dakwah adalah *mihwar tanzhimi*, yang focus pada konsolidasi dan pembinaan kader.⁷⁴ Intinya, perubahan harus dimulai dari kemampuan PKS dalam membangun kekuatan internal, baik dari infrastruktur maupun suprastruktur dakwah. Kedua adalah *mihwar sya'bi* (orbit masyarakat) di mana aktivitas dakwah mulai mengalirkan energinya untuk kepentingan masyarakat umum melalui gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui instrument organisasi keumatan.⁷⁵ Pada titik ini, pertumbuhan institusi –institusi social Islam yang memiliki relasi formal maupun informal dengan PKS yang dikenal dengan istilah *wajihah*, seperti sekolah, hospital, lembaga amal, dan lain-lain menjadi factor kelembagaan social yang memfasilitasi hubungan antara partai dengan masyarakat.

⁷² Majelis Pertimngan partai (MPP) PKS, *Filsafat dasar Perjuangan PKS*, tanpa publikasi, tanpa tempat, 2007.

⁷³ Aminuddin, *Bingkai Dakwah*, 2008, 1-5; MPP PKS, *platform*, 2007. Dalam Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS*....h. 163.

⁷⁴ MPP PKS, *Platform*, 2007, 30.

⁷⁵ MPP PKS, *Platform*, 2007, 31. Dalam Burhanuddin Muhtadi, *Dilea PKS*....h. 165

Menurut PKS, *mihwar sya'bi* memberikan banyak insentif bagi kader dan struktur kelembagaan social partai. Seperti, pertama; berdirinya LSM dakwah memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan beragam kepentingan masyarakat. Kedua; tokoh-tokoh dan kader partai akan lebih dikenal public. Ketiga; peluang untuk menarik tokoh-tokoh dari luar agar bergabung dengan partai. Keempat; lembaga-lembaga dakwah muncul sebagai kelompok penekan yang efektif. Kelima; pengelolaan lembaga dakwah secara professional boleh meningkatkan optimalisasi peran kelembagaan dan kader dakwah.⁷⁶ Fase dakwah ini memungkinkan PKS melakukan penetrasi kemasyarakat untuk meningkatkan basis dukungan electoral. Media dakwah tak lagi berpusat di masjid seperti yang dilakukan jamaah tarbiyah pada masa rezim otoriter, namun sudah merambah ke ranah yang lebih luas seiring dengan perubahan struktur politik yang lebih demokratis.

Tahap ketiga; adalah *mihwar muasasi* (orbit pelembagaan), di mana kader-kader PKS mulai muncul dan masuk ke dalam lembaga-lembaga social dan politik, termasuk parlimen, birokrasi, dan asosiasi-asosiasi profesi.⁷⁷ Misi utama kader partai ketika berada di fase dakwah ini adalah melakukan mobility vertical dan penetrasi ke dalam lembaga-lembaga public dengan cara mempengaruhi, menerjemahkan, dan merumuskan konsep dan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan-kebijakan public yang dihasilkan lembaga-lembaga politik tersebut. Tahap ini dibagi dalam dua sector, dakwah di parlimen dan birokrasi. Dakwah parlimenter adalah mimbar resmi Negara yang menyediakan forum bagi kader untuk melakukan perjuangan konstitusional bagi penerapan nilai-nilai Islam melalui legislasi (*taqnin*), pengawasan (*hisbah*), dan pernyataan public (*tabligh*). Adapun dakwah birokrasi adalah medan eksekutif dalam upaya menerjemahkan, mempengaruhi, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan yang sesuai

⁷⁶ *Ibid.*, h. 32

⁷⁷ *Ibid.*

dengan nilai-nilai Islam.⁷⁸ Ekspansi *mihwar muasasi* makin kentara ketika pada pemilu 2004 PKS berhasil meningkatkan perolehan suara hingga 600 % dari 1,3 % di 1999 menjadi 7,4 %. Puluhan kader masuk ke DPR tingkat nasional, belum lagi kader-kader yang terpilih sebagai anggota DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.⁷⁹

Tahap keempat; adalah *mihwar daulah* (orbit Negara), yang bertujuan untuk meraih kekuasaan secara demokratis dan menegakkan syariah Islam secara *kaffah*.⁸⁰ *Mihwar Daulah* ini mengandaikan PKS secara langsung dan penuh mengelola institusi-institusi Negara. Kalau dalam orbit lembaga (*mihwar muasasi*), interaksi kader PKS dalam sector birokrasi dan parlemen masih dilaksanakan secara individual dan parsial, maka dalam orbit Negara ini interaksi dilakukan secara total.⁸¹ Namun konstitusi dan manifesto serta *platform* partai, tidak begitu jelas menjelaskan tahap akhir dakwah tersebut. Perkara ini dilakukan untuk mengurangi kecurigaan public terhadap agenda dan cita-cita ideologis partai untuk mengubah dasar Negara Indonesia.

Melihat perkembangan PKS sejauh ini, kecenderungan pasca-Islamisme memang terlihat dari perilaku politik partai yang lebih menitikberatkan pada agenda substansiasi nilai-nilai Islam. terlebih lagi, secara politik dan social PKS belum berhasil membentuk kekuatan dominan, yang ditandai oleh kegagalan partai tersebut dalam meraih target 20 % suara pemilu 2009. Tiga orbit yang sudah dilalui PKS (*mihwar tanzhimi, sya'bi, dan muasasi*) memang masih memungkinkan bagi partai untuk tidak terlalu memperlihatkan agenda tersembunyi terkait dengan pransangka public

⁷⁸ *Ibid.*, h. 32-33.

⁷⁹ Burhanuddin Muhtadi, Dilema PKS...h. 171

⁸⁰ Burhanuddin Muhtadi, mengutip dari Rumadi, Gerakan Islamis ontemporer di Indonesia", Makalah dipresentasikan dalam Diskusi Lesehan kalyanamitra dengan tema "Menguatnya Fundamentalisme Agama: Ancaman bagi Pemenuhan hak Azasi Perempuan dan Demokrasi di Indonesia", 20 Juli 2010.

⁸¹ *Ibid.*, h.35

tentang pendirian Negara Islam. namun adanya *mihwar daulah* menyulitkan PKS mengelak dari kesan bahwa partai ini masih menyimpan cita-cita politik mendirikan Negara Islam. PKS memang terlihat lebih sabar dan tekun dalam menjalani tahapan-tahapan dakwah. Keempat fase di atas dilaksanakan secara gradual, dimulai dari bawah ke atas (bottom-up). Inilah yang disebut “*tadarruj*” (gradualisme), yakni serangkaian langkah persiapan menuju paket prognosis atau resep solusi yang dinamakan Islamisasi Indonesia tersebut bermuara pada formalisasi syariah ke dalam konstitusi.⁸² Pendiri Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna, menyatakan: *kita mulai (gerakan dakwah) dari individu, keluarga, lingkungan sekitar atau komunitas, dan kemudian masyarakat secara lebih luas. Ketika masyarakat itu sendiri telah meyakini Islam secara hakiki, maka tinggal persoalan waktu sebelum syariah Islam mampu diperluas (implementasinya) ke ranah Negara.*⁸³

Keempat tahapan di atas dapat dipilah menjadi dua strategi besar, yakni strategi cultural atau mobilisasi horizontal (*ta’biyah al-afaqiyah*) dan strategi structural atau mobilitasi vertikal (*ta’biyah al-amudiyah*). Mobiliti horizontal merangkum *mihwar tanzhimi* dan *sya’bi*. Inilah tahap yang meniscayakan kader-kader PKS melakukan proses internalisasi nilai-nilai dakwah dan penetrasi melalui penyebaran kader dakwah ke berbagai lapisan masyarakat agar mereka menerima *manhaj* Islam dan produk kebijakan yang Islami. Sementara mobiliti vertikal terdiri atas *mihwar muasasi* dan *daulah*. Kedua orbit ini meniscayakan adanya penyebaran kader ke lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif melalui mekanisme partai politik dan profesionalitas kader.

Setelah mukernas di Bali yang menegaskan status partai sebagai partai terbuka, maka PKS sebagai partai Islam memiliki beberapa anggota

⁸² Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS*...h. 177

⁸³ Burhanuddin Muhtadi mengutip dari Wickham, *Mobilising Islam*, 2002. Dalam *Ibid*.

parlemen di kawasan timur Indonesia beragama non-Islam. PKS juga pernah mengadakan Munas II di Hotel Ritz-Carlton dengan mengundang beberapa dubes termasuk Dubes Amerika Serikat untuk berdialog tentang Islam. sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar pasal 5, misi PKS adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati plurality, bersikap terbuka dan demokratis, serta bergotong royong menjaga kedaulatan Negara.⁸⁴

PKS bertujuan untuk membentuk masyarakat madani yang berbasis Islam (*religious-based civil society*), yang memungkinkan bagi umat beragama untuk menghadirkan *rahmatan lil alamin*. PKS menawarkan gagasan objektivitas nilai-nilai Islam, yaitu transformasi ideology dari wilayah personal-objektif ke dalam public-objektif. Adapun visi-misi serta tujuan dan fungsi PKS adalah sebagai berikut:

Visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945. Adapun Misinya adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan republic Indonesia.

Adapun tujuan partai ini adalah terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap anggota sebagai warga Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sdangkan fungsi partai adalah; 1) wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik; 2) memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa dan

⁸⁴ AD-ART PKS (Perubahan, 2013), h. 6

Negara; serta, 3) memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁵

Secara umum Tujuan partai politik menurut UU no. 2 Tahun 2008:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
5. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
6. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
7. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁸⁶

Dalam kes pemilihan calon walikota Makassar 2013 baru-baru ini setidaknya boleh dilihat program utama yang dijual oleh pasangan calon Partai Keadilan sejahtera (PKS):

1. Quick Response
2. Layanan satu atap
3. Transparansi Informasi
4. Walikota mendengar
5. Makassar Cyber Net
6. Optimalisasi Aparatur pemerintah

⁸⁵ AD-ART PKS (Perubahan, 2013), h. 6

⁸⁶ UU Partai Politik No. 2/2008

Dari tujuh program utama di atas jelas menggambarkan bahwa pasangan PKS dalam pemilihan walikota Makassar cukup memberikan gambaran terkait konsep pemerintahan yang baik (*good governance*). Meskipun sebenarnya secara substansial jualan PKS ini dalam kapasitasnya sebagai partai Islam tidak terlalu jauh berbeda dengan partai-partai “nasionalis-sekuler” lainnya. Fenomena ini sekaligus telah berpengaruh langsung dalam hal perolehan suara PKS dalam pemilu.

Oleh karena itu, dalam kasus Sulawesi Selatan, ada yang menarik untuk di eksplorasi terkait respon masyarakat terhadap partai terutamanya partai-partai Islam. hal tersebut boleh dilihat bahwa mengapa pemilih Muslim cenderung memilih partai nasionalis ketimbang partai Islam? setidaknya terdapat tiga jawaban: pertama, partai-partai nasionalis sukses melakukan pergeseran paradigm dari positioning partai yang awalnya dicap kurang ramah terhadap agenda-agenda religio-politik Muslim, menjadi lebih menerima aspirasi umat. Hal ini dukungan partai Golkar dan Demokrat terhadap RUU Sisdiknas dan RUU Anti-Pornografi yang menjadi “investasi politik electoral” partai nasionalis dalam merebut simpati pemilih.

Kedua, selain bermain pada isu-isu simbolis keagamaan, partai-partai Islam, termasuk PKS, perlu menyiapkan strategi electoral untuk menarik simpati pemilih Muslim yang makin rasional. Mayoritas pemilih Muslim sekarang lebih tertarik dengan isu-isu non-agama, terutamanya masalah ekonomi, ketimbang isu-isu keagamaan. Sebaliknya, partai-partai Islam dianggap kurang peduli terhadap isu-isu ekonomi dan terlalu sibuk berdebat soal isu-isu simbolis.

Pada akhirnya, jika partai-partai Islam, termasuk PKS, ingin menang dan dipercaya oleh rakyat, maka mereka harus mengeksplorasi dan menawarkan program-program untuk kesejahteraan rakyat yang lebih terukur, dan tidak lagi hanya mengandalkan retorika yang menguatkan sentiment keagamaan. Ini penting karena partai-partai Islam, termasuk PKS,

selama dicitrakan kalah dalam mengusung program untuk kepentingan rakyat.

2. *Hizbu Tahrir Indonesia (HTI)*

Tony Fitzpatrick menggambarkan bahwa kehidupan politik kini merujuk pada dua proses yang bertentangan tetapi saling memperkuat, yakni proses yang megarah ke pusat (*centripetal process*) dan proses yang mengarah ke pinggir (*centrifugal process*). Dalam konteks oposisi, Fitzpatrick melihat proses pertama sebagai oposisi yang mengarah pada kekuasaan pemerintah dalam hubungannya dengan tuntutan dan kepentingan rakyat banyak. Sedangkan proses yang kedua merupakan oposisi politik baru yang lebih dicirikan oleh kecenderungan para individu untuk melakukan mobilisasi di seputar isu tunggal, ketimbang oleh penggabungan diri dan partisipasi dalam partai politik. Menurut Fitzpatrick, oposisi parlementer memaknai politik sebagai perjuangan untuk mengontrol para anggota dewan. Sementara, gerakan ekstraparlementer memaknai politik sebagai estetika, yakni kultur tandingan. Yang pertama masih setia dengan istikah krisis dan kebangkrutan Negara, sementara yang kedua lebih banyak memperkuat ragam pandangan dari kelompok kiri dan kanan (*right-left spectrum*).⁸⁷

HTI merupakan sebuah gerakan ekstraparlementer karena aktivitas politiknya mengarah ke masyarakat (*centrifugal process*), berkisar pada isu tunggal, dan memaknai politik sebagai kultur tandingan, sebagaimana gambaran Tony Fitzpatrick tentang oposisi ekstraparlementer di atas. Hal ini dapat kita lihat dari curahan konsentrasi HTI pada pembinaan masyarakat alih-alih terlibat dalam pilihan raya, dari mobilisasinya dari separtar

⁸⁷ Lihat Tony Fitzpatrick, “*Seeming Contradiction: Parliamentary and Ekstraparlementary Politics of Opposition*,” <http://www.psa.ac.uk/cps/1995>. dalam Kurniawan Abdullah, *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstra parlementer: Hizbu tahrir Indonesia*, DIALOG: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Edisi, Tahun Ke-3, 2005. H. 39

isu tunggal berupa kewajiban kaum muslim untuk mendirikan Negara khilafah, dan dari pemaknaannya terhadap politik sebagai aktivitas yang mulia dan wajib, sebagai lawan dari anggapan muslim kontemporer bahwa politik itu kotor dan olehnya itu, patut di jauhi.

Dalam hal aktivitas politik dan pemikiran untuk menyebarluaskan gagasan dan sikapnya, HTI menerapkan aksi dan perjuangan politik sebagai metode gerakannya. Bentuk aksi ini boleh berupa demonstrasi, pengiriman delegasi ke berbagai kedubes, audiensi ke lembaga-lembaga tertentu Negara. Aksi demonstrasi biasanya digelar secara serentak di berbagai kota di Indonesia.

Selanjutnya, selain aktivitas penerbitan dan aksi politik, HTI juga menggelar berbagai diskusi, kajian, dan pertemuan yang menjadi konsentrasi dan kesibukan utama pada anggotanya. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan umum kepada masyarakat dan sekaligus menjangkau calon anggota. Kegiatan ini dapat dibagi menjadi dua pola: 1) kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah kepanitiaan dan merupakan program organisasi, yang dikoordinasi secara terpusat dan melibatkan mobilisasi seluruh anggota; 2) kegiatan yang diprakarsai oleh para anggota dan hanya melibatkan partisipasi sukarela.

Media pertama yang digunakan HTI untuk mensosialisasikan pemikiran dan gerakannya adalah Bulletin Jumat *Al-Islam*. Bulletin ini diterbitkan sejak 1994 dan disebarluaskan pada setiap hari jumat di berbagai kota besar dan kota madya di Indonesia. Selain disebarluaskan dalam bentuk cetak, seluruh edisi bulletin ini juga ditampilkan di situs www.al-islam.or.id. Media utama kedua dalam gerakan HTI adalah majalah bulanan *Al-Wa'ie*: "Media politik dan dakwah untuk Membangun Kesadaran Ummat", yang terbit

sejak September 2000.⁸⁸ Media ketiga adalah penerbitan buku-buku pegangan. Ada 23 buku yang menjadi pegangan anggota dan harus mereka kaji. Tiga buku yang harus dikaji tuntas oleh seseorang sebelum menjadi anggota adalah Nizham al-Islam (peraturan hidup dalam Islam); Mafahim Hizb al-tahrir (pokok-pokok Pikiran Hizbu tahrir); Al-Takattul al-Hizbi (pembentukan partai Politik).⁸⁹ Buku-buku pegangan ini menjadi rujukan tema maupun argumentasi dalam berbagai pandangan, pernyataan, dan sikap terulis HTI.

HTI juga menyebarluaskan gagasan dan sikapnya dalam bentuk booklet (brosur), leaflet (selebaran), dan pernyataan pers. Booklet adalah gagasan utama HTI yang dikemas dalam buku kecil dan disebarluaskan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat dan anggota. Leaflet merupakan selebaran yang berisi sikap resmi HTI dalam merespons berbagai persoalan yang terkait dengan Islam dan kaum muslim dalam kancah nasional maupun internasional. Sedangkan pernyataan pers merupakan pernyataan sikap HTI terhadap berbagai kasus dan peristiwa nasional maupun internasional, terutamanya yang terkait dengan Islam dan kaum muslimin.

Selain menggunakan media cetak, HTI juga menggunakan media elektronik dalam mensosialisasikan gerakannya. Website al-islam.or.id merupakan stus pertama HTI yang sudah beroperasi sejak tahun 2000. Fungsi utama dari situs ini adalah menampilkan tulisan-tulisan dalam bulletin Al-Islam dan berbagai selebaran yang dikeluarkan oleh HT Indonesia, HT wilayah lain, dan HT pusat. Selain itu, situs ini juga menampilkan berita terkini yang terkait dengan Islam dan kaum muslimin. Pada maret 2004, HTI meluncurkan situs keduanya, hizbu-tahrir.or.id. Situs kedua ini tampaknya

⁸⁸ Kurniawan Abdullah, *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstra perlementer: Hizbu tahrir Indonesia*, DIALOG: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan. Edisi, Tahun Ke-3, 2005. H. 39

⁸⁹ Lihat www.al-islam.or.id dan www.hizbu-tahrir.or.id

dikelola secara lebih serius dan memuat beberapa rubric utama, selain tetap menampilkan tulisan-tulisan dari Buletin *Al-Islam* dan majalah *Al-Wa'ie*.

Bentuk dan jenis kegiatan lain yang menunjang upaya transformasi pemikiran HT adalah seperti kegiatan di lingkungan intelektual yang biasanya berbentuk seminar, sedangkan kegiatan di lingkungan masyarakat awam biasanya berbentuk tabligh akbar, bedah buku, atau kegiatan lain yang bersifat cair dan terbuka. Secara umum kegiatan-kegiatan HTI dapat dipilah sebagaimana berikut: dialog interaktif di radio, diskusi public, kajian rutin, pelatihan, forum silaturahmi, tabligh akbar dan tour dakwah. Pada sebagian besar kegiatan tersebut, terdapat pemisahan antara laki-laki dan perempuan.

Diskusi public paling banyak diselenggarakan HTI. Nama dan bentuk forumnya bias bermacam-macam: konferensi, seminar, dialog interaktif, diskusi serial, bincang muslimah, bedah buku/majalah dan lain-lain. Kajian rutin yang diselenggarakan HTI dimaksudkan untuk mengenalkan lebih jauh gagasan-gagasannya kepada mereka yang sudah mulai tertarik dengan organisasi ini. Tema yang dibahas biasanya sudah mengerucut pada gagasan-gagasan inti HTI, misalnya "Metode Perubahan menuju Masyarakat Islam".

Tablig akbar lebih sering merupakan mesin politik yang digunakan HTI untuk menggalang dukungan massa. Peserta yang hadir biasanya berjumlah ratusan hingga ribuan dan karenanya, tempat yang digunakan adalah lapangan, gedung sukan, atau pelataran masjid. Tema yang diangkat biasanya merupakan gagasan utama HTI, terutama yang terkait dengan pentingnya Negara Islam dan persatuan muslim. Tablig akbar juga terkadang memanfaatkan public pigur sebagai cara menarik massa yang lebih besar.

Kehadiran Islam politik semacam ini tidak lepas dari kondisi krisis yang menimpa kaum muslim, baik krisis makna keagamaan maupun krisis struktural (politik dan sosio-ekonomi). Krisis makna keagamaan di kalangan muslim terjadi akibat perjumpaan Islam dengan modernitas. Krisis itu

berlangsung sejak abad ke-18 akibat pembongkaran yang dilakukan oleh Barat melalui perkembangan sains dan teknologinya. Peradaban Barat-modern yang asing dan superior telah menyeret Islam ke dalam sebuah pertarungan yang tidak seimbang, di mana umat Islam tidak hanya lemah dari segi peradaban, tetapi dari segi politik dan militer.⁹⁰ Akibatnya, umat Islam juga mengalami krisis struktural yang berujung pada penerimaan institusi negara-bangsa di sebagian besar kawasan muslim.

Selanjutnya Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan cita-citanya, memiliki tiga tahapan dakwah dan aktifitas politiknya, yang kemudian menjadi gerakan utama dalam perjuangannya.

Tahap tatsqif (pembinaan dan pengkaderan), adalah tahap pembentukan gerakan, dimana saat itu ditemukan benih gerakan dan terbentuk *halqah pertama* setelah memahami konsep dan metode dakwah Hizbut Tahrir. *Halqah* pertama ini kemudian menghubungi anggota-anggota masyarakat untuk menawarkan konsep dan metode dakwah Hizbut Tahrir, secara individual.

Siapa saja yang menerima *fikrah (Ideologi) Hizbut Tahrir* langsung dijak mengikuti pembinaan secara terus menerus dalam halqah-halqah Hizbut Tahrir, sampai mereka menyatu dengan ide-ide Islam dan hukum-hukumnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka memiliki kepribadian Islam, mempunyai pola pikir dan pandangan Islam, serta tatkala memutuskan sesuatu selalu berlandaskan pada tolak ukur Islam, yaitu halal dan haram.

HT memiliki pola jiwa yang Islami, sehingga kecenderungannya senantiasa mengikuti Islam kapanpun, serta menentukan langkah-langkahnya atas dasar Islam. Mereka ridah kepada sesuatu yang diridhai Allah dan rasulnya, marah dan benci kepada hal-hal yang membuat Allah

⁹⁰ Lihat Tibi, Islam, 1, 21-22, 54; Howard M. Federspiel, *Islam and Ideology in the Emerging of Indonesian State* (Leiden: E.J. Brill, 2001), h. 18; Ahmad S. Mousalli, *The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights* (Florida: University Press of Florida, 2001), h. 41-43. Dalam Kurniawan Abdullah, Fenomena Gerakan.....

dan Rasulnya murka, lalu mereka akan tergugah mengemban dakwah ketengah-tengah umat setelah mereka menyatu dengan Islam.

Tahap tafa'ul (berinteraksi), adalah tahap berinteraksi dengan masyarakat, agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya. Yaitu dengan cara menggugah kesadaran dan membentuk opini umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam, sehingga mereka menjadikan ide-ide dan hukum-hukum Islam sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka perjuangkan ditengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersama-sama Hizbut Tahrir dalam usahanya menerapkan Islam dalam segala aspek, mengangkat seorang Khalifah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia.

Pada tahap ini, Hizbut Tahrir mulai beralih menyampaikan dakwah kepada masyarakat banyak secara berama-sama. Pada tahapan ini Hizbut Tahrir melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut:

1. Pembinaan *Tsqafah Murakkazah* (intensif) melalui halqah-halqah Hizbut Tahrir untuk para pengikutnya, dalam rangka membentuk kerangka gerakan dan memperbanyak pengikut serta mewujudkan pribadi-pribadi yang Islami, yang mampu memikul tugas dakwah dan siap mengarungi samudera cobaan dengan pergolakan pemikiran.
2. Pembinaan *Tsaqafah Jama'iyyah* bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam, secara terbuka kepada masyarakat umum. Aktifitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, dan ditempat-tempat pertemuan umum lainnya. Juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran.
3. *Shiraul Fikri* (pergolakan pemikiran) untuk menentang ideologi, peraturan dan ide-ide kufur, selain untuk menentang aqidah yang rusak, ide-ide yang sesat dan pemahaman-pahaman yang rancu. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, kekeliruan ide-ide tersebut dengan

Islam, untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat dari ide-ide yang sesat itu, serta dari pengaruh dan dampak buruknya.

4. *Kifaahus Siyasi* (perjuangan politik) yang mencakup aktifitas-aktifitas:
 - a. Berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan. Mengungkap strategi yang mereka rancang.
 - b. Menentang para penguasa di Negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya, mengungkapkan rencana kejahatan mereka, menyampaikan nasihat dan kritik kepada mereka.
5. Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat, yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan umat.⁹¹

Tahap Istilamu al-Hukmi (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara nyata, mudah dan menyeluruh, sekaligus menyebarkan risalah Islam keseluruh dunia. Metode dakwah Rasulullah saw menunjukkan bahwa untuk menegakkan Islam secara menyeluruh, mesti ada kekuatan secara mutlak untuk melaksanakannya. Yaitu kekuatan pemerintahan. Karena itu, salah satu tahapan dakwah Rasulullah saw adalah menerima kekuasaan (*istilam al-hukm*). Pada setiap musim haji banyak orang-orang Madinah yang datang ke Makkah. Di antaranya adalah 75 orang pemimpin dan para tokoh kabilah di Madinah yang telah menganut Islam. Di Makkah mereka melakukan Baiat Aqabah II kepada Rasulullah. Sebelum baiat tersebut dilangsungkan, Nabi Muhammad saw menyampaikan kepada mereka, "Saya meminta ikrar tuan-tuan untuk membela saya seperti membela isteri-isteri dan anak-anak tuan-tuan sendiri". Peristiwa ini mencerminkan adanya proses penerimaan kekuasaan oleh Rasulullah saw terhadap kekuasaan dari masyarakat Madinah yang diwakili oleh para tokoh mereka.

⁹¹ Taqiy al-nabhani, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis, alih bahasa Abu Afif dan Nurkhalish, Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 1992. H. 43-47.

Pada tahapan ini Hizbut Tahrir menggunakan cara *Thalabun-nusrah* (meminta pertolongan) dari orang-orang yang memiliki kekuasaan atau pengaruh. Ini dilakukan untuk dua tujuan:

1. Tujuan *himayah*; bertujuan agar mereka membela Hizbut Tahrir bersama anggotanya, hingga tetap mampu mengemban dakwah dalam keadaan yang aman.
2. Sebagai perantara untuk meraih kekuasaan dengan mendirikan Negara Khilafah dan menerapkan sistem hukum Islam.⁹²

Metode dakwah dalam menyeru pada kebaikan yang ditempuh Hizbut Tahrir merupakan metode dakwah Rasulullah yang mereka gali dari Siroh Nabawi, namun oleh banyakkalangan, metode dakwah yang digunakan Hizbut Tahrir masih sangat kaku dan masih perlu penyesuaian dengan realitas kekinian hingga umat lebih mudah dalam menerima Islam itu sendiri.

Secara umum sebagaimana telah dijelaskan bagaimana tahapan/langkah (politik) baik PKS maupun HTI dalam mencapai cita-citanya.

Setidak bagan berikut ini bisa menjelaskan tahapan tersebut:

PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)	HIZBU TAHRIR INDONESIA (HTI)
1. <i>Mihwar Tanzhimi</i> (pembinaan kader)	1. <i>Tahap Tatsqif</i> (pembinaan/pengakderan)
2. <i>Mihwar Sya'bi</i> (orbit masyarakat)	2. <i>Tahap Tafa'ul</i> (Interaksi)
3. <i>Mihwar Muasasi</i> (orbit Kelembagaan)	3. <i>Tahap Istilamul Hukmi</i> (Pengambil alihan kekuasaan)
4. <i>Mihwar Daulah</i> (orbit Negara)	
Negara Islam	Negara Islam

⁹² *Ibid.*, h. 79

Dari penjelasan di atas jelas menggambarkan bahwa kedua gerakan Islam tersebut, meskipun wilayah politiknya berbeda, akan tetapi tujuan utamanya sama yaitu Negara Islam/khilafah. Meskipun diakui bahwa politik adalah suatu mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Politik berusaha supaya manusia dapat bekerjasama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan diri, baik terhadap ancaman yang datang dari luar maupun terhadap permusuhan yang terjadi di dalam masyarakat sendiri. PKS dan HTI turut bermain di dalamnya dalam kerangka mengatur umat manusia demi mencapai masyarakat yang sejahtera sesuai dengan cara dan ideology mereka masing-masing.

Upaya penegakan syariah yang diusung oleh keduanya (PKS dan HTI) menurut penulis adalah bukan sebagai sebuah indikator bahwa mereka menghambat demokrasi. Justru menurut penulis perjuangan penegakan syariah adalah menjadi penguat berjalannya demokrasi meskipun secara substansial (demokrasi substansial). Syariah telah menjadi pilihan masyarakat sebagai penawar krisis. Transisi demokrasi awal tahun 2000-an diwarnai beragam persoalan. Hal yang paling menonjol adalah ketidakmampuan negara menjamin keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum. Di satu sisi, alat keamanan negara mengalami delegitimasi dan ketidakmampuan akibat beban sejarah Orde Baru; juga tuntutan reformasi internal kelembagaan Polri dan TNI. Di sisi lain, kelompok-kelompok sosial menikmati euforia kebebasan berekspresi, berserikat, dan berpendapat. Ruang kebebasan menjadi arena ekspresi beragam kelompok menggunakan standar moralitas masing-masing. Akibatnya, konflik dan ketegangan sosial sering terjadi, bahkan berujung pada anarkisme massa dan premanisme jalanan.

Di tengah kondisi tersebut, syariah menjadi alternatif, terutama di daerah berpenduduk mayoritas Muslim seperti Cianjur, Bulukumba, Madura, dan Padang serta termasuk beberapa kab/kota di Sulawesi Selatan. Alternasi

bukan dalam pengertian substitusi formal-legalistik, melainkan lebih merupakan konstruksi diskursif sebagai rujukan baru standar moralitas dan tertib sosial. Disebut konstruksi diskursif karena sesungguhnya gerakan syariah bersifat parsial dan supervisial. Parsial karena cenderung sangat terbatas di wilayah ritual keagamaan, misalnya shalat berjemaah, membaca Al Quran, dan berbusana muslim/muslimah. Sementara terkait problem kemiskinan, pendidikan, korupsi, toleransi, dan integrasi sosial belum tersentuh. Apalagi isu-isu menyangkut hubungan manusia dengan alam dan lingkungan.

Oleh karena itu, gerakan syariah masih bersifat supervisial, wilayah permukaan. Gerakan syariah cenderung belum berorientasi jangka panjang penyelesaian masalah sosial ekonomi masyarakat. Sebaliknya, ia masih berorientasi hasil jangka pendek dalam waktu singkat dan terukur. Terlepas dari berbagai keterbatasannya, diskursus syariah setidaknya mampu menjadi ikatan moralitas bersama, terutama di daerah berpenduduk mayoritas Muslim. Dalam kondisi krisis, masyarakat membutuhkan sistem nilai yang menjadi pegangan bersama. Krisis sering kali menimbulkan anomi di mana sistem lama tak berlaku lagi, atau terdelegitimasi, sementara sistem baru pengganti belum ada.

Pertumbuhan pesat perda syariah terjadi dalam periode anomi ini. Dalam konteks inilah inisiasi syariah berjasa menghindarkan masyarakat dari risiko chaos yang lebih besar akibat ketiadaan basis nilai (moralitas) bersama. Argumentasi ini diperkuat fakta: periode "keemasan" gerakan syariah di daerah-daerah rata-rata hanya 3-5 tahun, kemudian kehilangan pesona dan pengaruhnya di masyarakat.

Gerakan syariah di tingkat lokal juga telah jadi momentum konsolidasi social sekaligus konsolidasi demokrasi. Diskursus syariah telah menarik kelompok Islam ideologis untuk masuk ke episentrum dinamika demokrasi lokal. Mereka sebelumnya tereksklusi (excluded) dari aktivisme

politik. Mereka adalah eks Masyumi dan Darul Islam serta pengusung ideologi syariah. Selama empat dekade (1950-1990-an) mereka mengalami represivitas militer dan stigmatisasi rezim.

Selama periode tersebut mereka terpaksa atau dipaksa apolitis. Padahal, untuk membangun demokrasi substantif diperlukan partisipasi aktif semua elemen masyarakat. Dalam konteks inilah diskursus syariah jadi magnet sekaligus ruang partisipasi politik kelompok Islam ideologis. Perkembangan ini tentu saja sangat bermakna bagi peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.⁹³

Menarik untuk melihat konsolidasi dan partisipasi politik kelompok Islam ideologis tak hanya terjadi pada periode keemasan gerakan syariah. Untuk kasus Kabupaten Bulukumba, misalnya, periode keemasan gerakan syariah terjadi pada 2001-2006 di bawah Bupati Patabai Pabokori. Pada periode tersebut, gerakan syariah mampu memobilisasi sumber daya manusia dan finansial dalam jumlah besar. Diskursus syariah mewarnai birokrasi pemerintahan, pendidikan, dan pengajaran di sekolah, bahkan acara hajatan perkawinan di masyarakat. Setelah 2006, ketika kekuasaan lokal berganti, gereget syariah meredup. Dukungan finansial menipis. Mobilisasi kiai dan ustaz juga berhenti.

Akan tetapi, hal itu tak serta-merta me-redepolitisasi kelompok Islam ideologis. Konsolidasi gerakan tetap terjaga. Partisipasi substantif dalam proses kebijakan juga secara konsisten tetap dilakukan. Jika sebelum deklarasi gerakan syariah mereka cenderung menarik diri dari aktivisme politik, kini mereka aktif memengaruhi proses kebijakan. Mereka tidak masuk struktur kekuasaan politik, tetapi memiliki medium penyaluran aspirasi politik yang efektif dalam nalar demokrasi lokal.

⁹³ Hakimul Ikhwan, Gerakan Syariah dan Demokrasi, Kompas, 26 Desember 2011

Selain itu, kelompok Islam ideologis yang semula sering menggunakan aksi jalanan sebagai media amar makruf nahi mungkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran, kini mulai mengadopsi metode yang lebih elegan. Gerakan moral tak lagi beringas, tetapi damai dan terukur. Tindak kekerasan fisik tidak lagi terjadi, terutama dalam menyikapi praktik immoral seperti judi dan prostitusi.

Kondisi ini dipengaruhi setidaknya dua hal. *Pertama*, internalisasi nilai syariah yang damai dan merahmati semua pihak. *Kedua*, mekanisme demokratis dipercaya membuka ruang kemungkinan (kemungkinan) mewujudkan cita-cita perjuangan. Dengan demikian, gerakan syariah di banyak daerah telah berkontribusi membangun dan memperkuat demokrasi. Relasi keduanya tidak terjadi dalam pertarungan saling menegasi. Sebaliknya, perlu dipahami dalam bingkai saling mengisi dalam membangun sistem demokrasi.

Ulasan terhadap dua studi kasus (PKS & HTI) di atas secara umum menunjukkan ada empat pergeseran yang cukup ajek dalam ideology dan aktivisme Islamis yang cenderung lebih terejawantahkan sebagai sebuah langkah peralihan dari konteks non-demokratis ke konteks demokratis di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan:

1. ***Dari ide pembentukan Negara Islam dan penegakan syariah ke nilai-nilai Islam/syariah***: dalam kasus-kasus tertentu, normalisasi demokratis perspektif PKS khususnya menunjukkan pergeseran dari perjuangan syariah (prasyarat aktivisme Islamis) yang membutuhkan institusi baru (sebagai system atau Negara Islam), sampai ke focus syariah sebagai sekumpulan nilai atau prinsip-prinsip yang ingin diundangkan melalui proses politik yang ada. Mereka lebih cenderung maeraih tujuan melalui partaisipasi politik, ketimbang revolusi, hal ini merupakan kesimpulan logis dari suatu keputusan taktis; tetapi, ini dapat juga memiliki konsekuensi luas sebab berpotensi mengubah hubungan ideologis dan praktis Islamisme dengan tujuan historisnya, yakni Negara Islam. secara spesifik,

Negara Islam menjadi kurang penting bagi Islamis sebagai factor dalam Islamisasi masyarakat. Samahalnya HT, meskipun mereka berjuang penegakan khilafah tetapi dalam tataran praktis, mereka lebih cenderung lebih *soft* dalam mengartikulasikan kepentingan mereka.

2. ***Dari pemerintahan Islam ke 'pemerintahan yang baik'***: istilah *good governance* telah menjadi jargon bagi kedua gerakan ini baik PKS maupun HTI. kedua studi kasus menggambarkan sekularisasi bertahap dari agenda kebijakan Islamis. Ini bukan untuk menegaskan bahwa Islamis meninggalkan agenda keagamaan mereka atau mengadopsi kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip keislaman mereka. Bagi mereka, berpegang teguh pada penafsiran Islam tetap penting. Tetapi Islamis dalam konteks-konteks ini juga menjadi terlibat dalam, dan dipaksa menanggapi, berbagai isu luas dimana 'Islam' berbicara sangat sedikit. Dan kadang-kadang sulit menunjukkan kepada para pendukung apa yang Islami dari jalan keluar yang ditawarkan oleh gerakan-gerakan ini. Misalnya, ini tercermin dalam pendekatan-pendekatan terhadap kebijakan ekonomi yang telah bergeser dari focus historis Islamisme mengenai kesetaraan social kependekatan yang lebih neoliberal. Pergeseran ini berfungsi sebagai tujuan substantive dalam kaitannya dengan upaya Islamis, tak hanya untuk menemukan respons kebijakan rasional terhadap permasalahan nyata, tetapi juga berfungsi sebagai tujuan politik, dalam rangka menarik pendukung-pendukung baru.
3. ***Keanekaragaman anggota yang lebih besar***: pergeseran dalam ide dan aktivisme gerakan Islamis memudahkan dan mencerminkan perubahan dalam keanggotaan gerakan dan partai ini. Sebagai gerakan sosio-religius, Islamis biasanya membatasi keanggotaan mereka bagi orang-orang yang cocok dengan kriteria tertentu-biasanya seseorang, muslim atau bahkan 'muslim khusus' dalam menganut penafsiran Islam tertentu dan peranannya dalam kehidupan public. Sebagai partai politik dalam

konteks demokratis, hal yang terpenting adalah memperluas ruang lingkup keanggotaan, khususnya menarik orang berbakat secara politik dari semua kalangan. Kecenderungan ini kemudian banyak pengamat yang menilai bahwa gerakan Islam khususnya PKS sangat pragmatis dalam kondisi-kondisi tertentu. Samahalnya HT, meskipun tidak seterbuka PKS akan tetapi demi perkembangan dan mewujudkan visi dan misi organisasi juga harus bertindak “pragmatis” dalam kondisi tertentu. Misalnya, tidak adanya ketegasan bagi calon anggota untuk masuk dalam organisasi mereka. Contoh lain, juga tidak adanya ketegasan bagi anggota untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan umum.

4. ***Osilasi ketimbang sikap menengah (moderation)***: Dilihat dari permukaan, tinjauan terhadap dua kasus di atas antara PKS dan HTI mereka sepakat mendukung gagasan bahwa demokrasi yang lebih besar cenderung meluweskan gerakan Islamis ke tengah atau bahkan tampil secara buka-bukaan.⁹⁴

⁹⁴ Kesimpulan ini juga sebagian sama dengan kesimpulan yang diambil oleh Greg Fealy dan Anthony Bubalo. Lihat Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. 2012. *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*. Terjemahan oleh Syamsu Rijal, PKS dan Kembarannya; *Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Jakarta, Komunitas Bambu. H.5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan identitas keislaman yang kental, maka sangat wajar ketika simbol keislaman tersebut sangat terkait dengan identitas politik mereka. Ekspresi politik Islam dan Islam politik di Sulawesi Selatan mempunyai identitas tersendiri. Wajah Islamisme yang bergerak pada wilayah intra dan ekstra parlementer di Sulawesi Selatan memberikan warna tersendiri dalam konstalasi politik lokal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. PKS dan beberapa partai-partai Islam lainnya seperti PPP dan PBB yang lebih memilih masuk dalam struktural kekuasaan turut memberikan warna tersendiri dalam aktivisme mereka dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam. KPPSI dan beberapa kekuatan gerakan Islam yang berada pada wilayah ekstra parlementer lebih cenderung akomodatif dengan pemerintah juga memberi warna tersendiri dalam aktivisme mereka dalam memperjuangkan syariat Islam. Beda halnya dengan Hizb Tahrir Indonesia yang lebih cenderung konsisten dengan konsep Khilafahnya sehingga lebih terkesan kontra dengan model demokrasi yang ada sekarang.

Setidaknya bahwa Islamisme di Sulawesi Selatan dengan pola pergerakannya cenderung ke arah pos-Islamisme, yakni sebuah gerakan yang lebih modern. Artinya, bahwa kebanyakan gerakan-gerakan yang ada lebih cenderung akomodatif dengan penguasa atau pemerintah. Kecuali Hizb Tahrir (HTI) yang lebih konsisten dengan dasar dan visi politik mereka dibandingkan gerakan-gerakan ideologis lainnya di Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, HTI tetap berada pada wilayah kritik karna dianggap tetap menikmati system demokrasi yang ada sekarang. Logikanya HTI tidak akan pernah bertahan dengan eksistensinya saat sekarang ini kalau mereka tidak melakukan “negosiasi” dengan Negara. Kecenderungan pergeseran

wajah dari Islamisme ke pos Islamisme ini kurang lebih dipengaruhi oleh tiga sumber pengaruh dan tantangan utama, yakni, pengaruh sistem politik yang ada di Indonesia, munculnya kaum sekuler kritis dan faktor geo-politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Salam Sidahmed and Anoushiravan Ehteshami. (ed.). 1996. *Islamic fundamentalism*. Westview Press.
- Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason. 2012. *Zealous Democrats: Islamism and Democracy in Egypt, Indonesia and Turkey*. Terjemahan oleh Syamsu Rijal, PKS dan Kembarannya; Bergiat jadi demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki. Jakarta, Komunitas Bambu.
- Anthony Oberschall. 1973. *Social conflicts and social movement*. New Jersey: Prentice Hall.
- Anhar Gonggong. 2004. *Abdul Qahhar Mudzakkar dari patriot hingga pemberontak*. Yogyakarta: Ombak.
- Azyumardi Azra. 1996. *Pergolakan politik Islam dari fundamentalisme, modernisme, hingga Post-modernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Bernhard Platzdasch. 2009. *Islamism in Indonesia; Politics in the emerging democracy*. Singapore.
- Bahtiar Effendi. 2000. *Repolitisasi Islam; pernahkah Islam berhenti berpolitik?*. Bandung: Mizan.
- Burhanuddin Muhtadi. 2012. *Dilema PKS; suara dan syariah*. Jakarta: Gramedia.
- G.H. Jansen. 1980. *Islam Militan; Sebuah uraian dan analisis yang tajam tentang konfrontasi antara Islam dengan barat saat ini*. Terjemahan, *Militant Islam; An informed and incisive analysis of Islam's confrontation with the western world today*. Bandung: Pustaka.
- Greg Fealy, 2004. *Islamic radicalism in Indonesia: The Faltering revival,* Southeast Asian affairs 2004 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies).
- Haedar Nashir. 2007. *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi salafiyah ideologis di Indonesia*, Jakarta: RMBOOKS.

- Muhammad Rahmat Imdadun. 2003. *Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980-2002: Studi atas gerakan tarbiyah dan Hizbut Tahrir Indonesia*. Tesis Master, Universitas Indonesia.
- Nazih Ayubi. 1991. *Political Islam; religion and politics in the Arab world*. London: Routledge.
- John Calvert. 2008. *Islamism: A documentary and reference guide*. India: Green Wood Press.
- John L. Esposito, (ed.). 1997. *Political Islam; revoultion, radicalism, or reform?*. London: Lynne Rienner, Inc.
- John L. Esposito. 1990. *Islam dan Politik*, Terjemahan, Jakarta: Bulan Bintang.
- Masdar Hilmy .2010. *Islamism and Democracy in Indonesia; piety and pragmatism*, Singapore.
- Olivier Roy. 1994. *The Failure of Political Islam*. London: I.B. Tauris Publishers, London.
- Peter R. Demant. 2006. *Islam vs Islamism: the dilemma of the muslim world*, London.
- Laura Guazzone. 1995. *The Islamist Dilemma; the political role of Islamist movement in the Arab world*, UK: Ithaca Press, UK.
- Samuel P. Huntington. 1996. *The Clash of Civilizations and the remaking of world order*, New York.
- Samuel Graham Wilson. 1976. *Modern Movemets Among Moslems: scholarly resources*. Inc, New York.
- Saiful Mujani. 2007. *Muslim Demokrat; Islam Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*, Jakarta: Gramedia.
- Taufik Abdullah. 1987. *Islam dan Masyarakat: pantulan SejarahIndonesia*, Jakarta: LP3ES.
- The Emirates Center for Strategic Studies and Research. 2003. *Islamic Movements; impact on political stability in the Arab world*. Abu Dhabi.

Jurnal:

Burhan Ghalioun. 2010. Islamology Comes to the Aid of Islamism, *Diogenes*, 257: 120.

Daniel Pipes. 2000. Islam and Islamism: Faith and Ideology, *The National Interest*, Washington. 87-93.

Hussin Muthalib. 1990. Islamic Revivalism in ASEAN States: Political Implication, *Asian Survey*, Vol. 30, No.9. 877-891.

William I. Robinson. 2010. Globalization and Social Movements: Islamism, Feminism, and the Global Justice Movement *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*. 39: 187

Peter Baehr. 2011. Marxism and Islamism: Intellectual conformity in Aron's time and our own. *Journal of Classical Sociology*. 11:173.

Arun Kundnani. 2008. Islamism and the roots of liberal rage, *Race Class*, 50: 40

Ali Riaz. 2004. *God Willing: The Politics of Islamism in Bangladesh*. Lanham, MD: Rowan and Littlefield. pp. 23.

Kurniawan Abdullah, *Fenomena Gerakan Politik Islam Ekstra parlementer: Hizbu tahrir Indonesia*, *DIALOG: Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan*. Edisi, Tahun Ke-3, 2005.

CURRICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama : Syahrir Karim, M.Si
NIP/NIK : 19780410 200901 1 013
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkajene, 10 April 1978
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Golongan / Pangkat : III/ d / Penata
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Makassar
Alamat : Jl. Sultan Alauddin N0. 63 Makassar
Telp./Faks. : 082189110778/ -
Alamat Rumah : Jln. Sultan Alauddin No. 57 E Makassar
E-mail : sahrirka@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
2001	S.1	IAIN Alauddin Makassar	J. Siyarah/Politik Islam
2004	S.2	UniversitasGadjah Mada	Studi Ilmu Politik
2011- Sekarang	S.3	Universitas Kebangsaan Malaysia	Political Science

PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2007	Pelatihan Metodologi Penelitian	LPPM Universitas Al Asyariahmandar
2009	TOT: <i>Urban and Local Government and Finance: Citizens Report Card and Methodology</i>	The World bank Institute and Hasanuddin University
2009	Pelatihan Analisis Data Statistik Bagi Dosen UIN Alauddin Makassar	UIN Alauddin Makassar
2009	Pelatihan E-Learning Bagi Dosen UIN Alauddin Makassar	UIN Alauddin Makassar
2009	Pelatihan Sistem Informasi Akademik (SIKA) UIN Alauddin Makassar	UIN Alauddin Makassar
2009	Pelatihan Publikasi dan Kehumasan UIN Alauddin Makassar	UIN Alauddin Makassar

PENGALAMAN JABATAN

Jabatan	Institusi	Tahun ... s.d. ...
Ketua Penyunting Vox Populi	Jurusan Ilmu Politik UIN Aalauddin Makassar	2010-2012
Ketua Penyunting Jurnal Ilmu Politik Profetik	Jurusan Ilmu Politik UIN Aalauddin Makassar	2013s.d Sekarang

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Jabatan	Sumber Dana
2013	Aktivisme Islam dan Demokratisasi di Sulawesi Selatan	Peneliti Mandiri	LP2M UIN Alauddin
2004	Otonomi desa dan Masyarakat Adat (Penelitian Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Bulukumba)	Peneliti Mandiri	Mandiri
2008	Realitas Politik Kiai dalam Dinamika Politik Lokal (Analisa Sosio-Politik Terhadap eksistensi Kiai di Makassar)	Peneliti Mandiri	Mandiri

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2013	Politik Islam 1	UIN Alauddin Press (buku)
2012	Politik Desentralisasi (Membangun Demokrasi Lokal)	UIN Alauddin Press (buku)
2011	Sistem Politik Indonesia	UIN Alauddin Press (buku)
2010	Perwakilan Politik di Indonesia (Kajian terhadap Lembaga dan Proses Demokrasi)	Jurnal "Sulesana" 2010
2009	Masyarakat Adat dalam Pusaran Desentralisasi	Penerbit: CV. Berkah

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2012	Proceedings International Conference on Islam, Politics, Law and Social Science	UIN Alauddin Press (Editor)